



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT



DISKOMINFOSTASAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, Februari 2026

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut.**



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP. 19840320 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Persiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut terdiri 1 Esselon II Kepala Dinas, 4 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan Kepala Bidang Komunikasi. Sedangkan Esselon IV sejumlah 4 Jabatan (2 Kepala Sub Bagian dan 2 Kepala Seksi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang merupakan upaya untuk mewujudkan Tujuan “Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital”.

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 berorientasi pada sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital. Strategi yang disusun untuk mengembangkan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Digital /SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Meningkatkan penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan pelayanan Aplikasi dan Informatika; Meningkatkan kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi; serta

Meningkatkan Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektor; dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan *e-Government*, yang diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Digital/SPBE, yang mengacu pada Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai/indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 ini sebesar **3,12** dengan predikat penilaian **baik**. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan implementasi pemerintah digital/SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2025 berdasarkan pada 1 sasaran, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,12	3,10	99,36%
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	5 nilai	-	-

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dari Anggaran Rp. 20.021.478.299,64 terealisasi sebesar Rp. 18.795.961.958,91 (93,88%), dan fisik 99,36%.

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Bimbingan teknis ataupun pelatihan kepada seluruh administrator sistem dan jaringan SKPD serta pelatihan literasi digital guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Digital secara berkala per triwulan.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pengembangan dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	10
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	16
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Visi RPJMD	19
B. Misi RPJMD	20
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	20
D. Strategi dan Arah Kebijakan	23
E. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Akuntabilitas Kinerja	28
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	28
B. Akuntabilitas Keuangan	75
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Strategi Peningkatan Kinerja	80
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

D. Cascading Kinerja

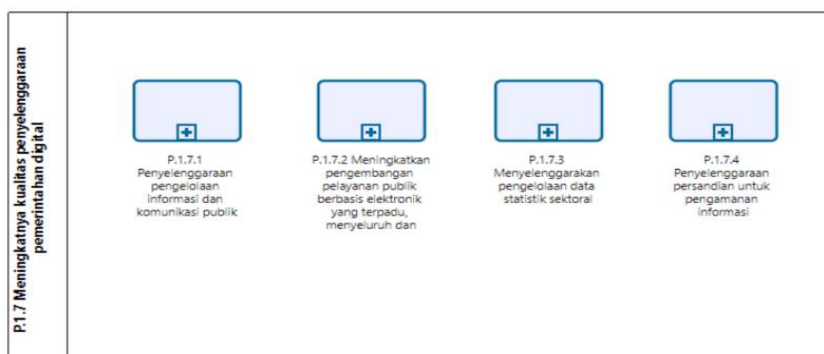
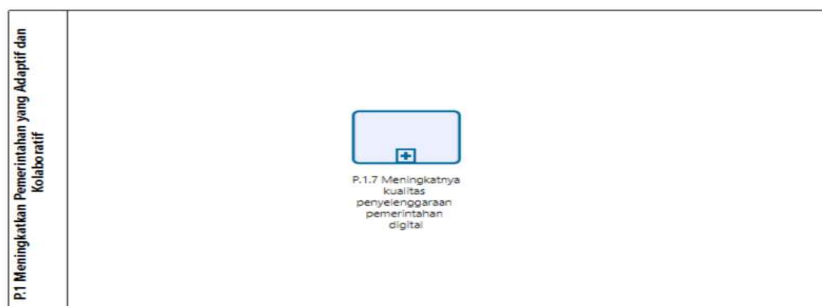
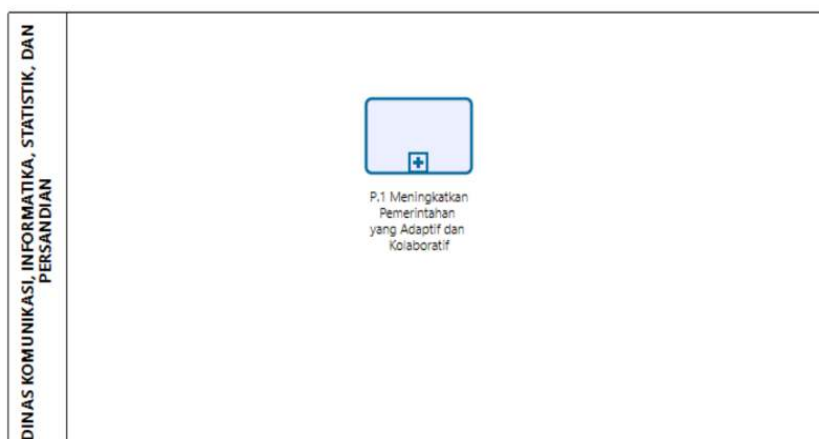
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki

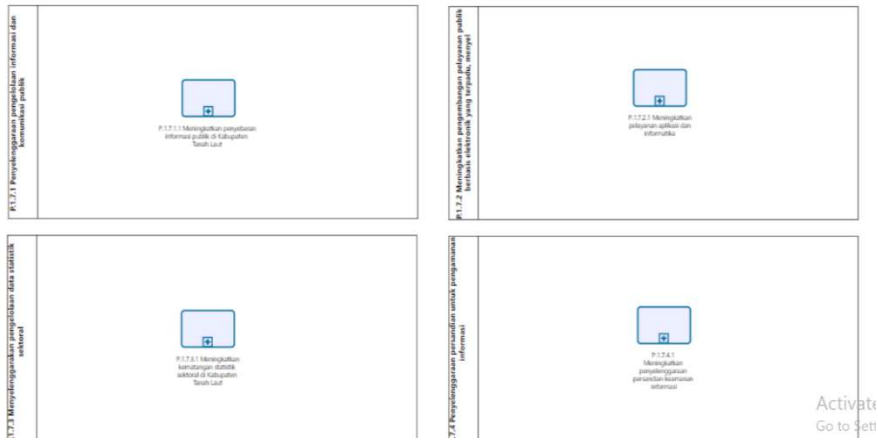
target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

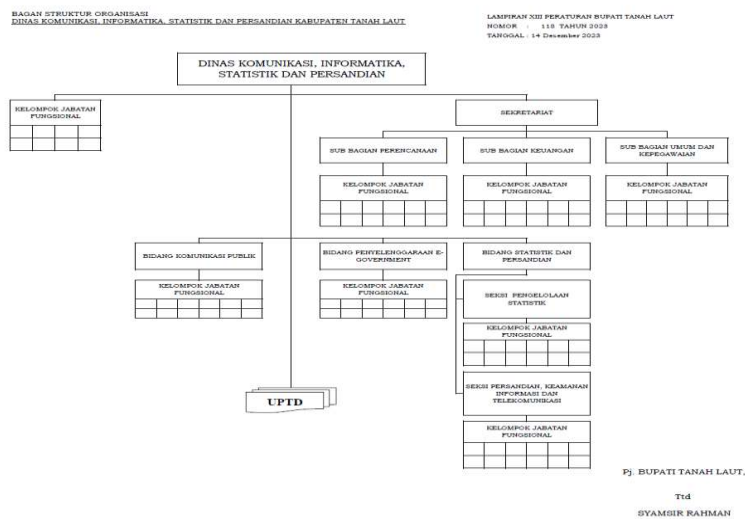




Gambar 1.1 Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yakni:

1. Dinas Komunikasi, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas
 - 5) pembinaan UPTD dinas; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
 - a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran;
 - 3) administrasi umum dan kepegawaian
 - 4) ketatausahaan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
- 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

6. Bidang Komunikasi Publik

a. Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Komunikasi publik mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan Renja bidang komunikasi;
- 2) perumusan kebijakan bidang komunikasi
- 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi
- 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi
- 5) pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik
- 6) pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik
- 7) penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

- a. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *e-government*.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan Renja bidang penyelenggaraan *e-government*
 - 2) perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan *e-government*;
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan *e-government*;
 - 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan *e-government*;
 - 5) pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
 - 6) pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
 - 7) penyiapan bahan rekomendasi izin bidang *e-government*;
 - 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *e-government*;
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8. Bidang Statistik dan Persandian

- a. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistik dan persandian, yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan diseminasi data statistik, serta pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang statistik dan persandian, termasuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- 2) pengelolaan statistik melalui perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan diseminasi data statistik
 - 3) pengelolaan persandian dan keamanan informasi melalui perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tata kelola persandian dan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah
 - 4) pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja lain terkait penyelenggaraan statistik dan persandian
 - 5) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang statistik dan persandian
 - 6) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik dan persandian
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
9. Seksi Pengelolaan Statistik
- Seksi Pengelolaan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik.
10. Seksi Persandian, Keamanan Informasi, dan Telekomunikasi
- Seksi Persandian, Keamanan Informasi, dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persandian dan pengamanan informasi, serta pembinaan teknis dan koordinasi dalam penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1.1 Tabel isu strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya pemenuhan indikator penilaian SPBE	Bertambahnya indikator penilaian untuk pemenuhan penilaian dan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut oleh Kementerian PAN dan RB		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terpenuhinya indikator pada area tata kelola terkait aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan, serta TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 2. Aplikasi penunjang SPBE diretas oleh pihak luar 3. Masih sebagian Aplikasi yang telah terintegrasi ke dalam aplikasi penunjang SPBE 4. Sebagian dokumen tata kelola TIK sebagai referensi penerapan TIK belum terpenuhi 5. Peningkatan Kapasitas SDM SPBE di masing-masing SKPD. 6. Perlunya pemeliharaan perangkat dan infrastruktur SPBE 		Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut
Pengelolaan Informasi Publik sebagai wujud transparansi pemerintahan	Belum optimalnya pengelolaan keterbukaan informasi	Banyaknya sumber dan media Informasi Publik yang beredar di masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem aplikasi mengalami gangguan 2. Informasi Pembangunan 		Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten

daerah	di daerah	Kabupaten Tanah Laut yang tidak resmi dan tidak teruji kebenarannya seperti informasi hoax		<p>kabupaten belum lengkap</p> <p>4. Sarana dan prasarana penunjang mengalami kerusakan sehingga perlu pememajaan.</p> <p>5. Tidak seluruhnya informasi tentang pemerintah daerah sampai ke masyarakat</p> <p>6. Perlunya perangkat penangkal petir/arde dan kejut listrik untuk mencegah terjadinya korsleting listrik pada peralatan elektronik.</p> <p>7. Perlunya pelatihan SDM terkait pengelolaan informasi publik.</p>		Tanah Laut
Pengelolaan data statistik sektoral yang menjadi kewenangan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam menunjang pembangunan daerah	Seringnya terjadi tumpang tindih data yang kurang akurat dan valid		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pedoman/regulasi yang mengatur pengisian data aplikasi Satu Data Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut 2. SKPD sebagai produsen data belum optimal melakukan updating, validasi dan sinkronisasi data-data pembangunan daerah 3. Data statistik sektoral belum tersaji secara menyeluruh. 4. Perlunya peningkatan SDM 		Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut

				pengelolaan data statistik sektoral		
Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan persandian dan keamanan informasi	Belum tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang optimal dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Seringnya terjadi pencurian dan pemalsuan data maka diperlukan keamanan informasi terhadap data-data pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sosialisasi terkait pengamanan data dan informasi 2. Tidak adanya SDM terkait keamanan informasi 		Pengelolaan persandian dan keamanan informasi

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 38 orang yang terdiri dari 18 PNS, 5 PPPK penuh waktu dan 15 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

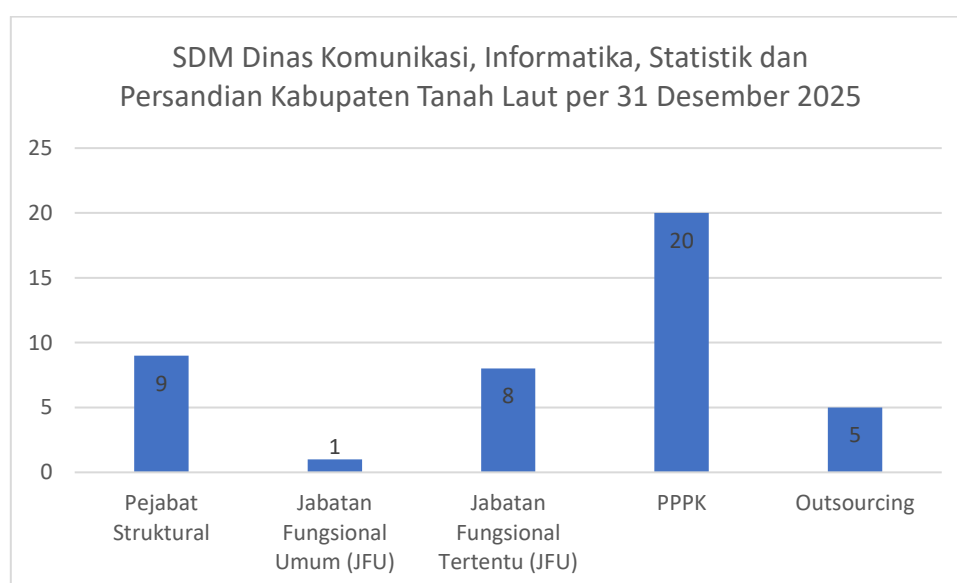
PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
6	8	4	-	20	38	6	17	6	-	9	-	-	38

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai peta jabatan adalah 67 (Enam puluh tujuh)

orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 38 (tiga puluh delapan) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 9 Pejabat struktural, 1 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 8 orang fungsional umum (JFU), 20 orang PPPK serta 5 orang tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 1.399 unit peralatan, 7 unit gedung kantor dan 2 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 5 unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua 6 unit.

Program, kegiatan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

Tabel 1.3 Program, kegiatan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.839.197.878,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.926.535,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.313.017.008,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.040.560,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.919.250,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	932.454.525,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.840.000,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.323.003.541,00
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.323.003.541,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.553.054.942,00
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.553.054.942,00
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	149.520.853,00
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.520.853,00
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	156.701.085,00
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	156.701.085,00
JUMLAH		20.021.478.300,00

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/226/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.4 Tindak lanjut atas LHE SAKIP tahun sebelumnya

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Keterangan
1	Pada Komponen Perencanaan: - Agar Indikator pada pohon kinerja disesuaikan dengan indikator kinerja pada dokumen Perencanaan. - Agar dalam pohon kinerja digambarkan adanya crosscutting yang menggambarkan keterkaitan dengan bidang/SKPD lainnya.	- Melakukan penyesuaian indikator pada pohon kinerja terhadap indikator kinerja pada dokumen Perencanaan. - Melakukan penyelarasan crosscutting dengan bidang/SKPD lainnya terhadap pohon kinerja pada aplikasi SIMPUN	1 Kegiatan	Januari sd. Desember 2025	Kepala Sub Bagian Perencanaan (Tim penyusun Laporan)	Penyelarasan pohon kinerja dengan output kinerja pada dokumen perencanaan.
2	Pada komponen pengukuran: - Agar dalam perhitungan realisasi rencana aksi kinerja yang disampaikan di aplikasi di dukung data dukung yang benar dan sudah terverifikasi. - Agar dilakukan pemantauan analisis capaian kinerja unit di bawahnya secara berkala.	Dalam penyajian data perhitungan realisasi rencana aksi kinerja yang disampaikan pada aplikasi akan dilengkapi dengan data dukung yang benar dan sudah terverifikasi. - Melakukan pemantauan analisis capaian kinerja unit di bawahnya	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan (Tim penyusun Laporan)	-

		secara berkala per triwulan				
3	<p>Pada komponen pelaporan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar dokumen laporan kinerja mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dengan uraian perhitungan realisasi sasaran/indikator PK. - Agar dokumen laporan kinerja mengungkap informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja daerah lain/di level nasional secara memadai. 	<p>- Menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja akan dilengkapi dengan uraian perhitungan realisasi sasaran/indikator PK.</p> <p>- Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja daerah lain/di level nasional secara memadai dalam dokumen laporan kinerja.</p>	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan (Tim penyusun Laporan)	-
4	<p>Pada komponen evaluasi internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar hasil rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya segera ditindaklanjuti yaitu Rencana Tindak Lanjut berupa feedback pimpinan akan disajikan umpan balik yang berkelanjutan terhadap kinerja. 	<p>Pada penilaian kinerja akan ditambahkan rencana tindak lanjut berupa feedback pimpinan sebagai umpan balik yang berkelanjutan terhadap kinerja</p>	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut	Dokumen Penilaian Kinerja Tahunan Pegawai

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi daerah untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut. Sebagai

bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks SPBE atau Indeks Pemerintah Digital.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital dengan sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital		Indeks SPBE	3.12	3.12	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintah Digital	NA	NA	1.7	1.7	2	2	2.3
	1.	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,10	3,00	2,15	2,15	2,3	2,3	2,6
			Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	N/A	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 000.8.6.3/14-DKISP/8/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	Hasil Penilaian SPBE/ Pemdri dari Kemenpan dan RB Republik Indonesia
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Hasil Penilaian BPS Kabupaten Tanah Laut

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5

1	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan informasi publik dan pengelolaan opini publik.	
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	- Penyusunan kebijakan rencana induk SPBE. - Peningkatan layanan e-government pada layanan publik dan administrasi pemerintahan.	
3	Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Pemanfaatan sistem satu data sektoral terintegrasi	
4	Peningkatan keamanan data dan informasi	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan data dan informasi.	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan penerapan <i>good governance</i> dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	1. Pemanfaatan jaringan intranet dan internet terpadu. 2. Digitalisasi layanan publik.	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	1	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,12	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	5,0	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 20.021.478.299,64. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.839.197.877,76
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.323.003.541,46

		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.553.054.941,75
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	149.520.853,19
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	156.701.085,48
JUMLAH			20.021.478.299,64

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,36%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 000.8.6.3/14-DKISP/VIII/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	1	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,12	3,10	99,36%	Tinggi
		2	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	5,0	-	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						99,36%	Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra

dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berdasarkan tersebut capaian rata-rata atas indikator kinerja terbagi menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Skala Kinerja > 100%	Sangat Tinggi
II	Skala Kinerja 90% - 100%	Tinggi
III	Skala Kinerja 80% - <90%	Sedang
IV	Skala Kinerja 70% - <80%	Rendah
V	Skala Kinerja < 70%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100%
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100%
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	Realisasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks SPBE (Nilai).

Tabel 3.4
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital	Indeks SPBE (Nilai)	Nilai	3,12

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital

Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital		-	2,80	3,10	3,12	3,10	99,36%
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi	Nilai	-	-	-	5	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									99,36%

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	Nilai	3,12	3,10	99,36%	2,3	134,78%
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi	Indeks	5	-	-	5,4	-

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Banjarmasin	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	Nilai	2,80	3,30	2,10	2,90	2,62
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi	Indeks	-	-	-	-	-

a. Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital

Tingkat implementasi Arsitektur Pemerintah Digital adalah ukuran kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik/digital. Ia menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah telah menata proses bisnis, mengintegrasikan data dan aplikasi,

memperkuat infrastruktur serta keamanan, dan menyediakan layanan publik digital yang terpadu.

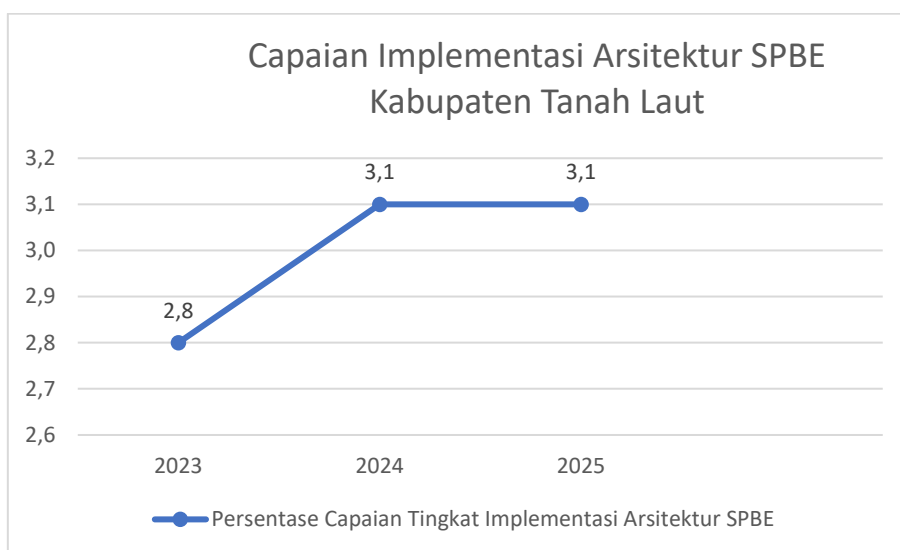
Hasil nilai tingkat implementasi Arsitektur Pemerintah Digital / SPBE Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 diambil dari penilaian Arsitektur Pemerintah Digital / SPBE di tahun 2024 di mana diperoleh nilai sebesar 3,10.

Tabel 3.8 Tingkat Impelementasi Arsitektur SPBE

Hasil Penilaian Tingkat Impelementasi Arsitektur Pemdi/SPBE yang diambil dari Hasil Evaluasi SPBE tahun 2024		
Domain Tata Kelola SPBE (Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE)	:	3,10
Perencanaan Strategis SPBE	:	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	3,25
Penyelenggara SPBE	:	3,50

Hasil penilaian Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 diambil dari data capaian indeks SPBE tahun 2024 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di mana diperoleh penilaian Implementasi Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital pada domain tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan tingkat capaian pada angka 3,10 dengan persentase sebesar 99,36% dari target nilai capaian 3,12. Dalam hal ini terlihat realisasi yang ada masih belum mencapai target realisasi namun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik.

Grafik 3.1
Capaian Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE



Sumber : DiskominfoStasan Kab. Tanah Laut

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada tahun 2025 penilaian Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan tingkat capaian pada angka 3,10 (kategori baik) dengan persentase sebesar 99,36% dari target nilai capaian 3,12. Dalam hal ini terlihat realisasi yang ada masih belum mencapai target realisasi namun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik. Perolehan nilai tersebut belum ada peningkatan jika dibandingkan dengan penilaian tingkat implementasi Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital pada tahun 2024 yakni sebesar 3,10 dan pada tahun 2023 dengan nilai 2,80. Pada tahun 2025 belum ada peningkatan untuk implementasi Arsitektur SPBE/Pemdi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan masa transisi perubahan indikator penilaian dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital. Berdasarkan surat Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia Nomor: B/66/PD.02/2026 perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE tanggal 21 April 2025, di mana pada lampiran 3 surat tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2025 tidak termasuk dalam lokus pembinaan penilaian Pemdi maka nilai indeks SPBE yang diambil ialah nilai indeks SPBE yang diperoleh di tahun sebelumnya yakni pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Capaian Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE tahun 2025 yang diambil dari capaian Implementasi Arsitektur SPBE tahun 2024 adalah 3,10, hasil yang sama dengan capaian Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE tahun 2023 yakni 3,10, sedangkan pada tahun 2022 dengan capaian 2,8, artinya pencapaian domain SPBE telah mengalami peningkatan atau semakin baik per tahunnya walaupun kecil. Persentase capaian Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 3,10 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan pada sasaran strategis SKPD yakni sebesar 2,3 maka nilai yang diperoleh ini telah melebihi target dengan capaian dalam persen sebesar 134,78%, namun karena di tahun 2025 ini terjadi transisi perubahan penilaian dari Arsitektur SPBE menjadi Arsitektur Pemerintah Digital (Pemdi) sehingga penilaian arsitektur SPBE di tahun 2026 akan mengalami perubahan target untuk menyesuaikan penilaian pada indikator Arsitektur Pemdi untuk di tahun ke depannya.

Dari reuiu penilaian Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE ini, seluruh pimpinan dan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diinstruksikan agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Capaian tingkat implementasi arsitektur Pemerintah Digital/SPBE Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 yang diperoleh dari penilaian tahun sebelumnya tercatat sebesar 3,10. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota terdekat yakni Kabupaten Tanah Bumbu yang mencatat nilai implementasi arsitektur sebesar 2,80, Kota Banjarbaru dengan nilai 2,10, dan Kota Banjarmasin dengan nilai 3,30, maka Kabupaten Tanah Laut masih memiliki nilai yang lebih baik dan lebih rendah dari capaian Kota Banjarmasin. Capaian Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru menunjukkan tingkat implementasi arsitektur Pemerintah Digital/SPBE yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa implementasi Arsitektur Pemerintah Digital/SPBE di Kabupaten Tanah Laut telah lebih baik dalam penerapannya. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat indeks tertinggi sebesar 2,90, Kabupaten Tanah Laut

juga masih lebih baik dengan terpaut kecil dari nilai capaian tersebut, yaitu hanya terpaut 0,2 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut telah cukup baik dalam penerapan/implementasi arsitektur Pemerintah Digital/SPBE namun harus masih tetap melakukan evaluasi untuk perbaikan untuk ke depannya, karena di tahun akan dilakukan kembali penyesuaian pada indikator-indikator penilaian implementasi arsitektur SPBE menjadi arsitektur pemerintah digital untuk mendukung pencapaian evaluasi indeks pemerintah digital (Pemdi) yang lebih baik di masa mendatang.

b. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi diperoleh dari hasil penilaian dari BPS Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dengan Formula penghitungan dari pemenuhan-pemenuhan indikator penilaian dari BPS.

Indikator Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan indikator baru bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sehingga kesulitan dalam memperoleh nilai indeks tersebut. Pada tahun 2025 ini merujuk pada BPS Kabupaten Tanah Laut masih belum ada informasi terkait hasil penilaian ataupun perhitungan pada Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk level daerah Kabupaten/Kota, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga di tahun 2025 terkait indeks tersebut masih belum diperoleh hasil penilaiannya. Adapun tujuan adanya indikator Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi di daerah.

4) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi pada tahun 2025 dengan target indeks 5 namun selama proses penerapannya di tahun 2025 hingga akhir tahun belum diperoleh hasil perhitungan terkait indeks tersebut. Demikian pula di tahun-tahun sebelumnya sehingga belum dapat dilakukan perbandingan untuk indikator tersebut. Namun dalam praktiknya pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah banyak melakukan penerapan teknologi, informasi dan

komunikasi yang berfokus pada inovasi serta pemerataan akses agar pembangunan TIK yang masih relevan dengan perkembangan zaman.

5) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi pada tahun 2025 belum terdapat capaian, sehingga belum dapat dilakukan perhitungan capaian yang diperoleh dari target tahunan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 5,4 pada target akhir Renstra, maka pada indikator Indeks Pembangunan, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi ini belum dapat dilakukan perbandingan capaian. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan perumusan dalam upaya pencapaian indeks teknologi, informasi, dan komunikasi.

6) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Tabel 3.9 Capaian Indeks Pembangunan, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Provinsi	Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK		Subindeks Penggunaan TIK		Subindeks Keahlian TIK		Indeks Pembangunan TIK	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52. Nusa Tenggara Barat	5,78	5,87	5,54	5,74	6,07	6,17	5,74	5,88
53. Nusa Tenggara Timur	5,61	5,74	4,75	4,70	5,92	5,94	5,33	5,36
61. Kalimantan Barat	5,72	6,00	5,75	5,99	5,54	5,51	5,70	5,90
62. Kalimantan Tengah	5,91	5,93	5,99	6,19	5,80	5,86	5,92	6,02
63. Kalimantan Selatan	5,96	6,26	6,04	6,18	5,72	5,79	5,95	6,13
64. Kalimantan Timur	6,62	6,60	6,66	6,84	6,74	6,76	6,66	6,73
65. Kalimantan Utara	6,30	6,51	6,33	6,38	6,25	6,24	6,30	6,40
71. Sulawesi Utara	6,01	6,06	5,72	5,87	6,30	6,28	5,95	6,03
72. Sulawesi Tengah	5,77	6,11	5,45	5,54	6,39	6,38	5,76	5,93
73. Sulawesi Selatan	6,15	6,37	5,73	5,96	6,30	6,36	6,01	6,21
74. Sulawesi Tenggara	5,77	5,92	5,69	5,89	6,51	6,51	5,88	6,03
75. Gorontalo	5,80	5,85	5,66	5,79	5,88	5,95	5,76	5,85
76. Sulawesi Barat	5,80	5,97	5,40	5,52	5,78	5,69	5,63	5,73
81. Maluku	5,97	6,02	5,36	5,10	7,01	6,98	5,94	5,84
82. Maluku Utara	5,67	5,85	4,92	5,04	6,62	6,60	5,56	5,68
91. Papua Barat ¹	5,68	5,50	5,28	5,30	6,51	6,47	5,69	5,61
94. Papua ²	3,68	3,94	2,47	2,53	4,89	4,87	3,44	3,56
Indonesia	5,81	5,91	5,91	6,10	6,04	6,08	5,90	6,02

Sumber : Indeks Pembangunan Teknologi & Komunikasi 2024 (volume 7, 2025)

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 masih belum diperoleh hasil penilaian. Nilai Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi yang diperoleh hanya pada level provinsi dan nasional. Jika dilihat dari data tersebut diperoleh nilai indeks Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai indeks 6,13, dan nilai indeks untuk Nasional adalah 6,02, sedangkan untuk penilaian indeks pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk tingkat

kabupaten/kota masih belum dapat diperoleh penilaian, sehingga dapat belum perbandingan belum dapat disusun. Tujuan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi adalah untuk menilai sejauh mana konektivitas suatu negara bersifat menyeluruh dan bermakna.

7) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian “Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital”, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan Peningkatan Pelayanan Aplikasi dan Informatika, Peningkatan Penyebaran Informasi Publik, Peningkatan Kematangan Statistik Sektor, Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi.

a. Peningkatan Pelayanan Aplikasi dan Informatika

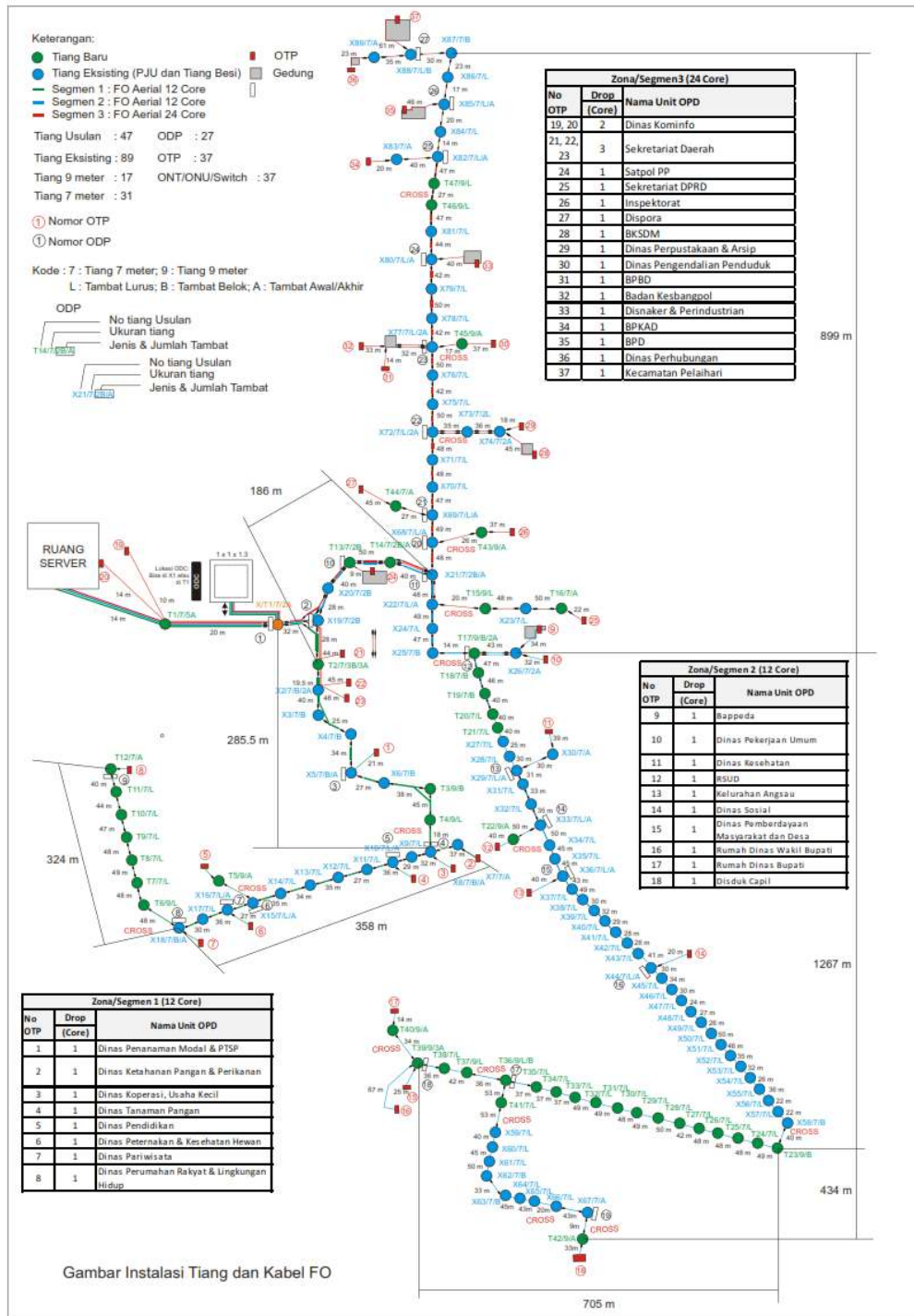
1. Pengelolaan jaringan intra pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki infrastruktur jaringan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terdiri dari jaringan internet dan jaringan intranet antar SKPD. Jaringan intranet digunakan juga sebagai layanan internet yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Jaringan antar SKPD sudah menggunakan infrastruktur fiber optik. Terdapat 31 lokasi SKPD yang sudah terhubung melalui jaringan fiber optik. Berikut daftar lokasi SKPD yang sudah terhubung melalui jaringan fiber optik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Lokasi yang terhubung jalur Fiber Optik di Kabupaten Tanah Laut

No	Perangkat Daerah/Instansi	Koneksi
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	FO
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	FO
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	FO
4	Badan Pendapatan Daerah	FO
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	FO
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	FO
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	FO
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	FO
9	Dinas Kesehatan	FO
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	FO

11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	FO
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	FO
13	Dinas Pariwisata	FO
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	FO
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	FO
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	FO
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	FO
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	FO
19	Dinas Perhubungan	FO
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	FO
21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	FO
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	FO
23	Dinas Sosial	FO
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	FO
25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	FO
26	Inspektorat Kabupaten	FO
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	FO
28	Sekretariat Daerah	FO
29	Sekretariat DPRD	FO
30	Kecamatan Pelaihari	FO
31	Kecamatan Bajuin	Jaringan Lastmile
32	Kecamatan Tambang Ulang	-
33	Kecamatan Kurau	-
34	Kecamatan Bati-Bati	-
35	Kecamatan Batu Ampar	-
36	Kecamatan Panyipatan	-
37	Kecamatan Takisung	-
38	Kecamatan Jorong	-
39	Kecamatan Kintap	-
40	Kecamatan Bumi Makmur	-



Gambar 3.1 Peta jaringan Fiber Optik Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

2. Pengelolaan network operation center (NOC).

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memiliki ruang server atau data center berupa ruang *Network Operation Center* (NOC) yang dapat digunakan untuk

melayani akses server aplikasi dan data, serta website seluruh SKPD. Spesifikasi server, penggunaan server dan sistem operasi server di data center yang dikelola Diskominfo Kabupaten Tanah Laut dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel 3.11 Daftar server yang dikelola di *Network Operation Center* (NOC)

No	Nama Server dan Deskripsi	Jenis Penggunaan Server (web server, mail server, dll)	Pemilik/Pengelola	Kapasitas Memori, Kapasitas penyimpanan, CPU	Jenis Storage (RAID 1, RAID 3, RAID 5, Non-RAID)	Sistem Operasi
1	ProLiant DL380 Gen9	Server Virtualisasi	Diskominfo	24 CPUs x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz 160 GB Memori 3,2 TB HDD	RAID 5	VMWare
2			Diskominfo	CPU(s) 6 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 v4 @ 1.70GHz 32 GB memori	RAID 5	Linux Proxmox
3	ProLiant DL380 Gen10	Server Virtualisasi	Diskominfo	Intel® Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) 128 Memori 4,8 TB	RAID 10	Linux Ubuntu
4	ProLiant DL20 Gen9	Aplikasi Perizinan Online	DPMPSTP	Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3,50Ghz 16 Gb memory 1 TB HDD	Non Raid	Linux Centos
5	ProLiant DL380 Gen10	Server Virtualisasi	Dinas PUPR	Intel® Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) 128 Memori 4,8 TB	RAID 10	VMWare ESXi-6.7.0

3. Pengelolaan aplikasi pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun dokumen Arsitektur Aplikasi dengan mengacu Perpres SPBE untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Dalam dokumen arsitektur aplikasi telah dijelaskan jenis-jenis aplikasi sebagai berikut:

1) Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan aplikasi umum layanan publik merupakan lapisan aplikasi umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (*shared services*). Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan melayani publik sesuai bidang dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tidak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini akan berhubungan dengan lapisan di bawahnya baik Lapisan Aplikasi Khusus maupun Lapisan Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan.

2) Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

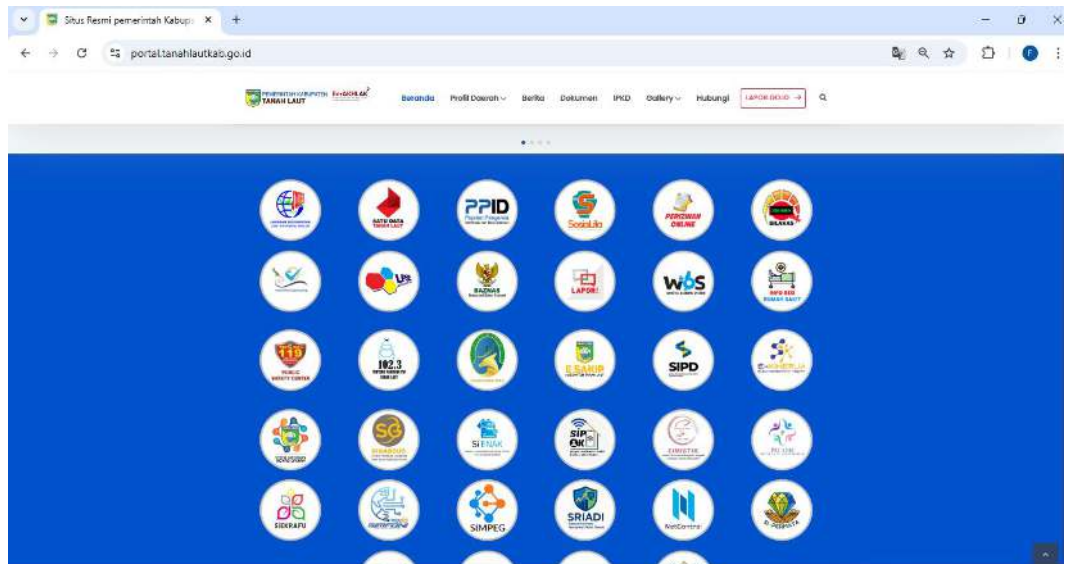
Lapisan aplikasi umum administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services). Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan. Lapisan ini akan mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung aplikasi pada lapisan di atasnya.

3) Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu. Aplikasi khusus ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh instansi tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi dari instansi lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam organisasi pemerintahan. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

4) Aplikasi Khusus Misi Tertentu

Lapisan aplikasi khusus misi tertentu mendukung misi tertentu organisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi khusus hanya dikembangkan dan digunakan oleh instansi tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam organisasi pemerintahan. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

Dalam pengelolaan aplikasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah membangun portal website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (<https://portal.tanahlautkab.go.id/>) untuk memudahkan dalam akses informasi dan layanan publik di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Telah terdapat 34 aplikasi layanan publik, 11 aplikasi layanan administrasi pemerintahan, dan 43 website informasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut per 2025. Berikut beberapa aplikasi yang telah terhubung dengan portal tanah laut sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Screenshot aplikasi layanan publik dalam portal Tanah Laut



Gambar 3.3 Screenshot aplikasi pemerintah daerah dalam portal Tanah Laut



Gambar 3.4 Screenshot link website pemerintah daerah dalam portal Tanah Laut

4. Pengelolaan domain Kabupaten.

Pengelolaan domain pemerintah daerah merupakan bagian penting dari tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital (Pemdi). Domain berfungsi sebagai identitas resmi digital pemerintah daerah, yang digunakan untuk situs web, subdomain, dan layanan email. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki dan mengelola domain utama pada tanahlautkab.go.id yang didalamnya telah dihubungkan dengan sub-sub domain layanan yang ada di pemerintah Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 3.5 Website Portal Tanah Laut

5. Pelaksanaan koordinasi penyediaan jaringan telekomunikasi.

Penyediaan jaringan telekomunikasi untuk pemerintah daerah maupun masyarakat membutuhkan koordinasi lintas sektor agar berjalan efektif. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh camat di Kabupaten Tanah Laut untuk memetakan wilayah yang termasuk dalam daerah blankspot. Serta menyampaikan potensi-potensi yang ada di wilayahnya sehingga memungkinkan terjadinya percepatan masuknya jaringan telekomunikasi ke daerah tersebut. Kabupaten Tanah Laut telah hampir 70% wilayahnya merupakan daerah bebas blankspot. Daerah-daerah yang saat ini masih termasuk blankspot sebagian besar masuk daerah pinggiran, hutan atau perkebunan dan tempat bukan pemukiman penduduk lainnya.



Gambar 3.6 Rapat koordinasi penyediaan jaringan komunikasi

6. Penyusunan master plan pengembangan komunikasi di daerah blank spot. Di tahun 2025, telah dilaksanakan penyusunan master plan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan blank spot area, di mana tempat-tempat yang termasuk blank spot akan dicarikan solusi terbaik dalam pemecahan masalah tersebut. Dengan adanya master plan pemetaan blank spot area, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang menjadi rekomendasi dalam pembangunan menara telekomunikasi atau pun melalui skema pengadaan peralatan GSM *Booster* ataupun alternatif lainnya.



Gambar 3.7 Rapat penyusunan master plan pengembangan komunikasi di daerah *blank spot*



Gambar 3.8 Dokumen Konsultansi Pemetaan Daerah Blank Spot di Kabupaten Tanah Laut

b. Peningkatan Penyebaran Informasi Publik Kabupaten Tanah Laut

1. Peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

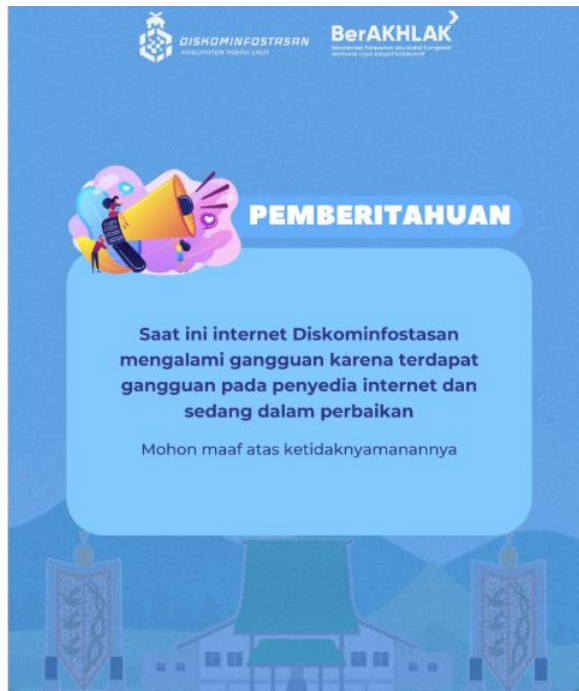
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kapasitas SDM perangkat daerah dalam hal pengelolaan Informasi dan dokumentasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta bimbingan teknis bagi operator PPID. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan investasi krusial untuk memastikan tata kelola keterbukaan informasi publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai standar UU Nomor 14 Tahun 2008. Upaya ini mencakup perbaikan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kompetensi teknis individu pengelola PPID.



Gambar 3.9 Pelaksanaan rapat koordinasi PPID dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Operator PPID dan SP4N Lapor Kabupaten Tanah Laut

2. Pemeliharaan aplikasi pengelolaan informasi.

Kegiatan pemeliharaan aplikasi pengelolaan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan rangkaian kegiatan rutin yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk memastikan portal/website layanan informasi public dapat berjalan optimal, aman, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemeliharaan ini krusial untuk mencegah kendala teknis yang dapat menghambat permohonan informasi publik. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan beberapa pemeliharaan ringan terhadap aplikasi PPID diantaranya pemeliharaan teknis sistem, pembaruan konten, optimalisasi fitur, asistensi dan monitoring, serta peningkatan keamanan informasi. Adapun Tujuan Pemeliharaan yaitu untuk memperkuat aksesibilitas, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik.



Gambar 3.10 Pemberitahuan gangguan aplikasi yang diakibatkan adanya gangguan internet pada server Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

3. Pelaksanaan kompetisi KIM tingkat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sukses menyelenggarakan kompetisi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025, dengan KIM Desa Banyu Irang berhasil meraih Juara Pertama. Pengumuman dan penyerahan penghargaan (plakat, sertifikat, uang pembinaan Rp3,5 juta) dilaksanakan oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto pada Apel Peringatan Sumpah Pemuda ke-97 pada tanggal 28 Oktober 2025 di Halaman Kantor Bupati. Sebagai tambahan, pada tahun 2024 yang lalu, tiga KIM dari Tanah Laut (KIM Karang Rejo, KIM Banyu Irang, dan KIM Tirta Jaya) berhasil masuk tujuh besar terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tujuan kompetisi ini bertujuan untuk mendorong peran KIM dalam menyebarkan informasi positif dan membangun desa.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Kompetisi KIM tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut

4. Pembinaan Sumber Daya Manusia KIM

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Tanah Laut dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tanah Laut. Pembinaan ini bertujuan menjadikan KIM sebagai ujung tombak dalam menyajikan informasi yang akurat, kreatif, dan mandiri kepada masyarakat. Beberapa poin penting terkait pembinaan SDM KIM di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya:

- Fokus Pembinaan: Diskominfo Kabupaten Tanah Laut berfokus pada peningkatan kemampuan KIM dalam pengelolaan dan diseminasi informasi, khususnya dalam mengelola saluran komunikasi dan media sosial untuk menyebarkan kebijakan pemerintah daerah.

- Sosialisasi dan Pendampingan: Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan langsung ke desa-desa, salah satunya contohnya di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, serta sosialisasi tingkat kabupaten.
- Target: Pembinaan menyoasar anggota KIM di desa-desa untuk meningkatkan wawasan dan ilmu dalam mengelola informasi, sehingga menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi publik.
- Prestasi: Pembinaan berkelanjutan terbukti efektif, terbukti dengan tiga KIM di Kabupaten Tanah Laut yang berhasil masuk ke dalam tujuh besar KIM terbaik se-Kalimantan Selatan pada tahun 2024.
- Peran KIM: KIM di Tanah Laut dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan fungsi utama layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan desa.



Gambar 3.12 Kegiatan foto bersama pengurus KIM di Kabupaten Tanah Laut

5. Pembinaan Sumber Daya Manusia pengelola SP4N LAPOR

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola SP4N-LAPOR! di Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi antarinstansi untuk memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Beberapa hal utama dalam pembinaan SDM pengelola tersebut:

- Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Diskominfo secara rutin menyelenggarakan Bimtek Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! yang melibatkan perwakilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana peserta terdiri dari 1 orang pejabat penghubung (setingkat Sekretaris SKPD) dan 1 orang admin pengelola operasional dari tiap instansi, dengan materi utama terkait penguasaan alur kerja aplikasi, mekanisme tindak lanjut pengaduan sesuai standar pelayanan, dan integrasi data pengaduan ke dalam sistem nasional.

- Koordinasi dan Rapat Evaluasi

Untuk menjaga performa pengelolaan LAPOR, Pemkab Tanah Laut mengadakan forum koordinasi strategis yang dilaksanakan secara berkala, seperti Rakor PPID dan Pejabat Penghubung LAPOR Tahun 2025, untuk mengevaluasi laju tindak lanjut laporan dan sinkronisasi data antar unit kerja. Selain itu juga dilakukan monitoring secara berkala. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan pengawasan berjenjang terhadap kinerja admin di lingkungan Pemkab Tanah Laut.

- Standarisasi Kompetensi dan Prosedur (SOP)

Pembinaan SDM juga diwujudkan melalui penetapan SOP Pengelolaan Pengaduan yang menjadi panduan baku bagi petugas. Petugas diwajibkan memiliki kualifikasi tertentu, seperti pemahaman mendalam mengenai sistem SP4N-LAPOR; kemampuan operasional teknologi informasi (komputer dan internet); dan kepatuhan terhadap batas waktu pemberian jawaban atas rekomendasi kementerian (paling lambat 30 hari kerja).

- Capaian Kinerja SDM

Berkat pembinaan yang intensif, pengelolaan pengaduan di Kabupaten Tanah Laut berhasil menempati peringkat pertama untuk laju tindak lanjut laporan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025.



Gambar 3.13 Pembinaan SDM pengelola SP4N LAPOR melalui kegiatan bimbingan teknis

6. Peningkatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Peningkatan monitoring opini dan aspirasi publik di Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada penguatan kanal digital dan integrasi sistem layanan pengaduan untuk memastikan respon yang lebih cepat dan transparan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memaksimalkan penggunaan platform nasional dan lokal untuk menjaring suara masyarakat, diantaranya melalui:

- SP4N-LAPOR!: Menjadi kanal utama yang terintegrasi secara nasional untuk pengaduan pelayanan publik.
- RAZAWALI & RAZALAKAS 112: Layanan aduan darurat dan umum yang spesifik digunakan di wilayah Tanah Laut.
- WA In De OCA: Inovasi layanan *WhatsApp* terintegrasi menggunakan teknologi chatbot (0822-5081-5857) untuk memudahkan akses informasi dan aspirasi melalui ponsel.

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan monitoring opini meliputi: peningkatan jumlah dokumen hasil monitoring menjadi target untuk mendokumentasikan setiap opini kebijakan dan aspirasi masyarakat secara sistematis guna pengambilan keputusan. Selain itu juga penguatan peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), memberdayakan kelompok lokal untuk menjadi jembatan informasi dan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat desa.



Gambar 3.14 Rapat koordinasi peningkatan monitoring dan aspirasi publik

Unit Kerja	Belum Terselesaikan	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Sekolah	Total	RWL	RTL	KMP	Terbukti Dibayar
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	0	0	0	52	158	1	4,33		2025-04-28 05:02:05
SATPOL PP & PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	48	100	1	0		2025-04-23 00:40:09
SACAH KETEGANGAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	1	100	0	5,00		2025-04-22 07:58:05
DIKAS KECERDASAN INFORMATIKA STATIS DAN DINDAS KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	1	100	0	5,00		2025-02-10 07:18:29
DIKAS PENGENDALIAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	1	100	0	5,00		2025-03-28 07:02:04
INSPEKSI DAN KAWALAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	1	100	1	0		2025-04-23 09:30:47
BADAN KESETIAWAJABAN DAN POLITEK KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
BADAN PENGACHTAR DAN BAKOR KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
BADAN PENKELUARAAN MASYARAKAT DAN KAWALAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
BADAN PERENCANAAN MASYARAKAT DAN BAKOR KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
Bakor Tanah Laut	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS KEBERSEKUTUAN DAN OLAKHAGA KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS KEBERSEKUTUAN DAN PENGENDALIAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS KESEKUTUAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS KETEGANGAN PASIEN & PERMAYANAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS KOPERASI, USAHA ROKOL, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS PERSEKUTUAN MASYARAKAT DAN PERMAYANAN KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS PERSEKUTUAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS PERSEKUTUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS PERSEKUTUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		
DIKAS PERSEKUTUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0		

Gambar 3.15 Rekapitulasi hasil monitoring pada aplikasi SP4N-LAPOR!

7. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.

Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan penyebaran informasi pemerintah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo). Target kinerja tahun 2025 diukur berdasarkan jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan media komunikasi publik, didukung oleh anggaran pengelolannya untuk memaksimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, melalui pengelolaan PPID Tanah Laut, media sosial dan website resmi portal Tanah Laut telah mengintegrasikan strategi konten ke dalam pohon kinerja untuk memastikan informasi pemerintah sampai ke masyarakat secara sistematis. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan konten media yang menarik minat masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan bimbingan teknis bagi para jurnalis di Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 3.16 Pelaksanaan bimtek jurnalistik skema konten kreator sertifikasi BNSP



Gambar 3.17 Peserta bimtek jurnalistik skema konten kreator sertifikasi
BNSP

8. Pelaksanaan peliputan kegiatan pembangunan daerah

Pelaksanaan peliputan kegiatan pembangunan daerah oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostasan) Kabupaten Tanah Laut berfokus pada penyebarluasan informasi kebijakan, capaian kinerja, dan inovasi Pemerintah Kabupaten kepada publik. Kegiatan ini mencakup dokumentasi, jurnalistik, dan pengelolaan media komunikasi publik. Adapun fungsi peliputan dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, diantaranya: Liputan Langsung yakni melakukan peliputan berita daerah, dokumentasi foto, dan video kegiatan Bupati, Wakil Bupati, serta instansi SKPD lainnya; Manajemen Konten yakni memproduksi berita tertulis dan konten multimedia untuk disebarluaskan di portal resmi pemerintah dan media sosial; Pengelolaan Media Internal yakni mengelola Portal Tanah Laut (tanahlautkab.go.id), YouTube, Instagram, dan media sosial resmi lainnya; serta Hubungan Media yakni mengelola kerja sama publikasi

dengan media massa (cetak, elektronik, online) untuk memperluas jangkauan informasi pembangunan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut bertindak sebagai pusat diseminasi informasi resmi, memastikan agenda pembangunan daerah terpublikasi secara masif, akurat, dan transparan, baik melalui media sosial, portal web, maupun media massa mitra.



Gambar 3.18 Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja tim peliputan

9. Pengelolaan media lainnya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tanah Laut mengelola berbagai media komunikasi publik untuk diseminasi informasi pemerintah. Media tersebut meliputi radio (Tuntung Pandang FM) untuk *talkshow*, peliputan dan publikasi kegiatan pemerintah, serta penyusunan konten publikasi. Selain itu, Diskominfo mengelola infrastruktur digital, termasuk layanan email pemerintah

(@tanahlautkab.go.id), website resmi, sistem keamanan informasi, dan layanan internet.



Gambar 3.19 Program Razawali, salah satu program unggulan Diskominfo bekerjasama dengan LPPL Radio Tuntung Pandang FM

10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi media Komunikasi publik.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) media komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Tanah Laut dilakukan secara rutin setiap semester untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pemerintah. Kegiatan ini meliputi evaluasi rekapitulasi hasil kinerja media milik daerah, memastikan akurasi data publikasi, serta merencanakan peningkatan konten komunikasi guna mendukung kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah bekerja sama dengan lebih dari 20 media publik (cetak, online dan elektronik) dalam hal penyebaran informasi publik dan pemberitaan pemberitaan daerah.



Gambar 3.20 Kegiatan koordinasi dan evaluasi kerja sama media komunikasi publik

11. Pengadaan prasarana dan sarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pengadaan prasarana dan sarana pendukung informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan publik, dan koordinasi, seperti melalui video conference, perangkat multimedia, dan teknologi informasi lainnya. Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut telah mengadakan beberapa sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik diantaranya pengadaan personal computer (PC) multimedia, drone, kamera DSLR, Laptop dan video tron outdoor.



Gambar 3.21 Beberapa pengadaan sarana pendukung informasi dan komunikasi publik

12. Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.

Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik merupakan rangkaian kegiatan sistematis untuk merawat, memperbaiki, dan mengelola alat serta fasilitas pendukung penyebaran informasi pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh perangkat, baik fisik maupun digital, berfungsi secara optimal, aman, dan siap digunakan untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2025 Diskominfo telah melakukan

pemeliharaan pada peralatan video tron yang terletak di depan halaman Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 3.22 Video tron Diskominfo di depan halaman Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut

c. Peningkatan Kematangan Statistik Sektor di Kabupaten Tanah Laut

1. Pemeriksaan data statistik sektoral oleh produsen data

Pemeriksaan data statistik sektoral oleh produsen data (OPD) adalah tahapan validasi internal untuk memastikan data akurat, sesuai standar data, memiliki metadata, dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebelum diserahkan ke Walidata. Proses ini melibatkan verifikator dan operator di instansi penghasil data. Setiap OPD selaku produsen data harus memastikan bahwa data yang dimiliki telah sesuai standar data statistik. Data tersebut diinput melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut.



Gambar 3.23 Aplikasi Satu Data Tanah Laut

2. Peningkatan kapasitas SDM statistik.

Peningkatan kapasitas SDM statistik di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya melalui Diskominfo, ditargetkan mencapai peningkatan kompetensi melalui sertifikasi 2 orang SDM statistik pada tahun 2025. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas data statistik agar 100% akurat dan sesuai standar. Upaya ini didukung dengan evaluasi kinerja tahunan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan data statistik sektoral. Di Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian menggelar *Kick-Off Meeting* Ekualisasi Data dan Informasi di Yogyakarta sebagai salah satu langkah penting untuk menyamakan persepsi, standar, dan kualitas data di seluruh SKPD agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.



Gambar 3.24 Kegiatan *Kick-Off Meeting* Ekualisasi Data dan Informasi

3. Pengembangan infrastruktur statistik sektoral

Pengembangan infrastruktur statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostasan) Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada penguatan tata kelola data untuk mendukung Satu Data Tanah Laut. Diskominfostasan membangun pusat data yang terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan data sektoral akurat dan terbaru. Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral (Satu Data Tanah Laut) guna menghimpun data dari berbagai SKPD dan memastikan keterpaduan data. Selain sarana fisik, dilakukan pendampingan (supervisi) dan sosialisasi kepada SKPD mengenai tata cara penginputan data pada aplikasi Satu Data, penentuan indikator, dan pemenuhan standar data. Menyediakan data statistik sektoral yang dapat diakses publik melalui situs resmi, termasuk penerbitan Buku Ikhtisar Statistik Sektoral. Infrastruktur statistik sektoral diintegrasikan dengan sistem keamanan informasi dan persandian untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.



Gambar 3.25 kegiatan sosialisasi pengintegrasian aplikasi Satu Data Tanah Laut ke dalam e-Walidata

4. Pelaksanaan analisis data statistik sektoral

Pelaksanaan analisis data statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo/Diskominfotik) Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada penguatan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam hal tugas pokok dan fungsi, Diskominfo/Diskominfotik Kabupaten Tanah Laut bertindak sebagai Walidata Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik sektoral, termasuk merumuskan kebijakan teknis, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarluaskan data sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses analisis data statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo/Diskominfotik) meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan (validasi/verifikasi), pengolahan, dan analisis data, hingga penyebarluasan (publikasi) melalui portal Satu Data. Analisis berfokus pada data sektoral OPD, menggunakan metadata sesuai dengan kaidah data statistik. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 3.26 Pelaksanaan analisis data statistik dengan didampingi oleh BPS Tanah Laut

5. Pemeriksaan data statistik sektoral oleh walidata.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Diskominfo melaksanakan pemeriksaan data statistik sektoral di daerah melalui portal Satu Data Tanah Laut dan integrasi submodul E-Walidata dalam SIPD-RI. Proses ini bertujuan memastikan akurasi, mutakhir, dan validitas data untuk perencanaan pembangunan (RPJPD/RPJMD) serta memperkuat transparansi dengan melibatkan SKPD dalam penyusunan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD). Berikut hal penting terkait pemeriksaan data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya: Platform Pemeriksaan menggunakan portal "Satu Data Tanah Laut" (data.tanahlautkab.go.id) dan sistem E-Walidata sebagai sarana penyusunan dan pengecekan data sektoral oleh SKPD. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kualitas, akurasi, dan keterbaruan data untuk dasar pengambilan keputusan yang valid, serta menghindari duplikasi data. Adapun proses pemeriksaan meliputi validasi standar data, metadata, dan indikator sektoral yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan target nasional. Koordinasi dan sinergi SKPD, dimana pemeriksaan dilakukan bersama oleh SKPD dan Diskominfo (sebagai Walidata) untuk memastikan data terintegrasi pada E-Walidata/SIPD-RI. Dengan kegiatan ini diharapkan perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) di Kabupaten Tanah Laut menjadi lebih tepat sasaran karena berbasis data yang terverifikasi dan akurat.



Gambar 3.27 Kegiatan pemeriksaan data statistik sektoral oleh Diskominfostran selaku walidata

d. Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi

1. Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Tanda Tangan Elektronik

Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kabupaten Tanah Laut dilakukan secara terpusat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostran) Kabupaten Tanah Laut. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital dan *E-Government* untuk mempercepat layanan publik. Dalam pelaksanaan fasilitasi pendaftaran TTE di Kabupaten Tanah Laut, Diskominfostran Kabupaten Tanah Laut ditugaskan sebagai instansi pengelola dan fasilitator pendaftaran serta penerbitan Sertifikat Elektronik bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Tanah Laut, bekerja sama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Pemkab Tanah Laut menargetkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menerapkan TTE secara bertahap. Fasilitasi

juga mencakup permohonan dari instansi vertikal atau unit kerja seperti Kepala Sekolah. Adapun TTE yang difasilitasi ini digunakan dalam dokumen kependudukan, dokumen dinas, serta terintegrasi dengan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). TTE yang diterbitkan sah secara hukum sesuai UU ITE dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tanah Laut (Perbup) Nomor 211 tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik.

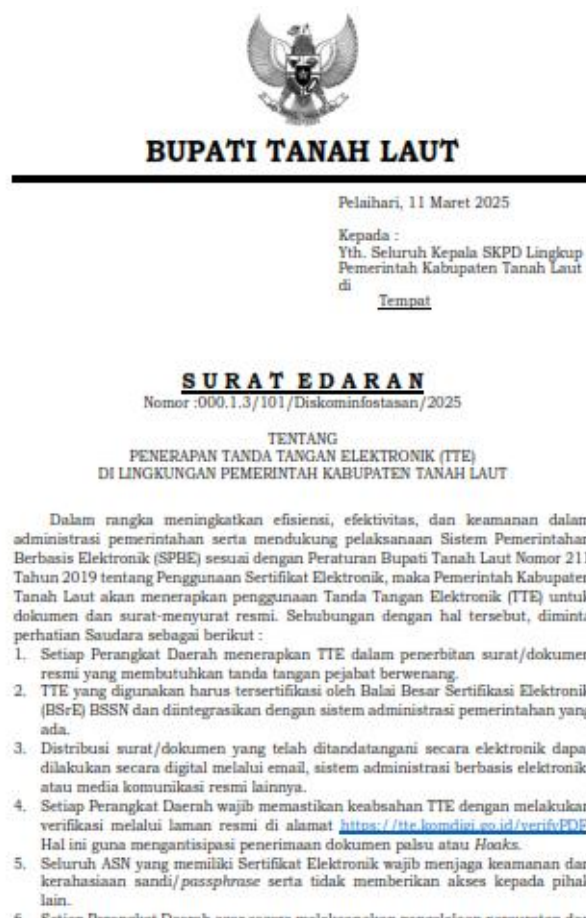


Gambar 3.28 Kegiatan fasilitasi pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE)

2. Pelaksanaan sosialisasi Tanda Tangan Elektronik

Pelaksanaan sosialisasi tanda tangan elektronik (TTE) di Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada peningkatan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten, khususnya melalui Diskominfo, menargetkan penerapan TTE di seluruh SKPD untuk mempercepat layanan, didukung regulasi seperti Perbup Nomor 211 Tahun 2019. Sosialisasi ini menekankan keamanan, validitas hukum, dan penggunaan

sertifikat elektronik resmi. Di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.1.3/101/Diskominfo/2025 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan dalam administrasi pemerintahan serta mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Gambar 3.29 Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkungan Pemkab Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT

INSTRUKSI BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)
PADA DOKUMEN DINAS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional terkait percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka diperlukan optimalisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik Terintegrasi pada dokumen kedinasan.

Penerapan Tanda Tangan Elektronik Terintegrasi untuk mendorong

Gambar 3.30 Instruksi Bupati Tanah Laut tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Dokumen Dinas Elektronik di Lingkungan Pemkab Tanah Laut

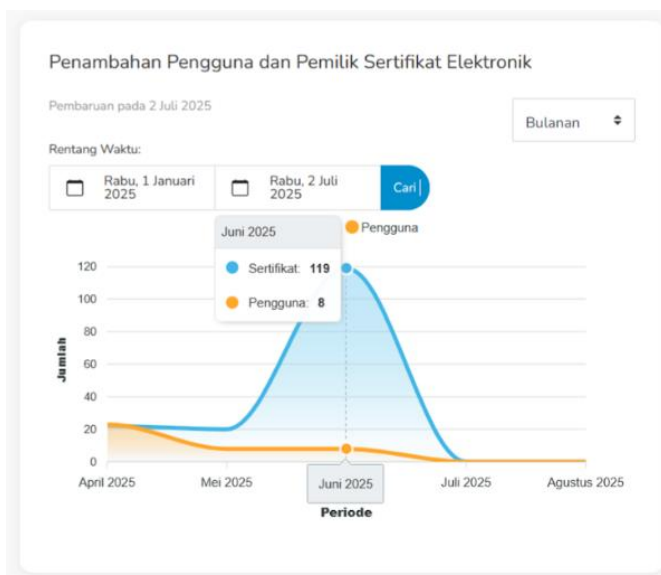
3. Pelaksanaan evaluasi Tanda Tangan Elektronik

Evaluasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada penguatan keamanan dan keabsahan dokumen, dikelola oleh Diskominfo bersama Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Evaluasi meliputi validasi kriptografis, pengelolaan sertifikat elektronik ASN, dan integrasi dengan aplikasi seperti SRIKANDI. TTE yang digunakan wajib bersertifikat agar sah dan tidak mudah dipalsukan. Beberapa hal terkait dalam pelaksanaan dan evaluasi TTE di Kabupaten Tanah Laut:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tanah Laut bertanggung jawab atas pendaftaran, penerbitan, dan pengelolaan TTE bagi ASN/pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Metode Validasi yakni evaluasi keabsahan TTE dilakukan melalui verifikasi kriptografis, bukan hanya sekadar QR Code yang tertempel di dokumen.

Penggunaan aplikasi TTE terintegrasi, khususnya aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk tata kelola kearsipan, didampingi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Laut. Dari segi keamanan, TTE di Kabupaten Tanah Laut dipastikan memenuhi kriteria keamanan informasi dan bersertifikat dari BSrE/BSSN. Dengan legalitas penggunaan TTE merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjamin kekuatan hukum yang sah pada dokumen elektronik. Adapun evaluasi ini bertujuan untuk memastikan

seluruh dokumen elektronik yang dihasilkan oleh Pemkab Tanah Laut valid, aman, dan sah secara hukum. Di Tahun 2025 per semester 1 telah mengalami peningkatan di mana TTE yang terbit sebanyak 119 sertifikat.

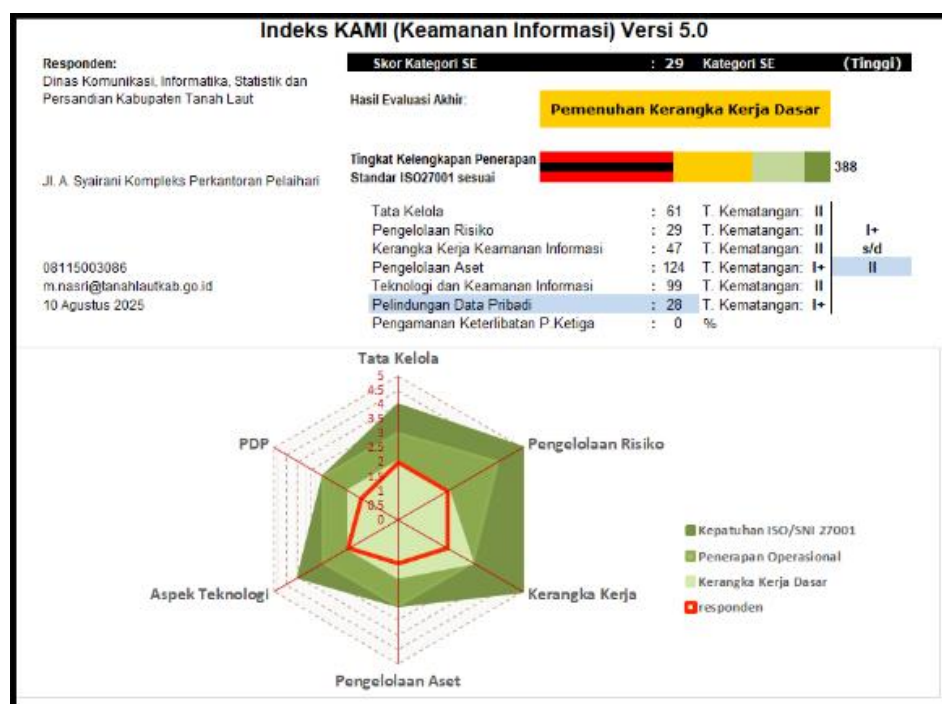


Gambar 3.31 Data penggunaan Sertifikat Elektronik

4. Pelaksanaan evaluasi mandiri keamanan Informasi

Pelaksanaan evaluasi mandiri keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, yang dijabarkan dalam Arsitektur Keamanan SPBE Tanah Laut. Proses ini mencakup penilaian standar keamanan, penerapan, serta kelaikan keamanan sistem informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah daerah. Tujuan evaluasi ini ialah memastikan penerapan sistem manajemen keamanan informasi berjalan efektif (Manajemen Risiko dan Keamanan) di seluruh instansi Kabupaten Tanah Laut. Dalam pelaksanaannya hasil evaluasi mandiri keamanan informasi akan dilanjutkan penilaian oleh Asesor Indeks KAMI dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Indeks KAMI 5.0 adalah instrumen evaluasi kematangan keamanan informasi yang dikembangkan BSSN untuk instansi pemerintah, selaras dengan ISO/IEC 27001:2022, dan fokus pada 5 dimensi keamanan (tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja, aset data, dan teknologi). Ini menjadi alat strategis untuk memastikan keamanan transformasi digital dan mengukur tingkat risiko siber, bukan hanya sekadar asesmen administratif.

Dalam laporan Onsite Assessment Indeks KAMI 5.0 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai dengan tingkat kematangan 388.



Gambar 3.32 Hasil penilaian Indeks KAMI versi 5.0 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5. Penyediaan infrastruktur keamanan Informasi

Penyediaan infrastruktur keamanan informasi di Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan data publik, dan penanggulangan ancaman siber. Upaya ini dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostasan) Kabupaten Tanah Laut, dengan fokus pada pembentukan C-SIRT (*Computer Security Incident Response Team*) dan kepatuhan terhadap aturan BSSN. Infrastruktur keamanan informasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya:

- Tim tanggap insiden siber (C-SIRT) Kabupaten Tanah Laut (Tim Operasional dan Tim Pengembangan)
- Panduan terkait mitigasi insiden
- Dokumen dan pelaporan
- Peralatan monitoring keamanan jaringan

Pada tahun 2025 C-SIRT Kabupaten Tanah Laut berhasil menyelesaikan skenario uji komunikasi pada kegiatan Uji Komunikasi

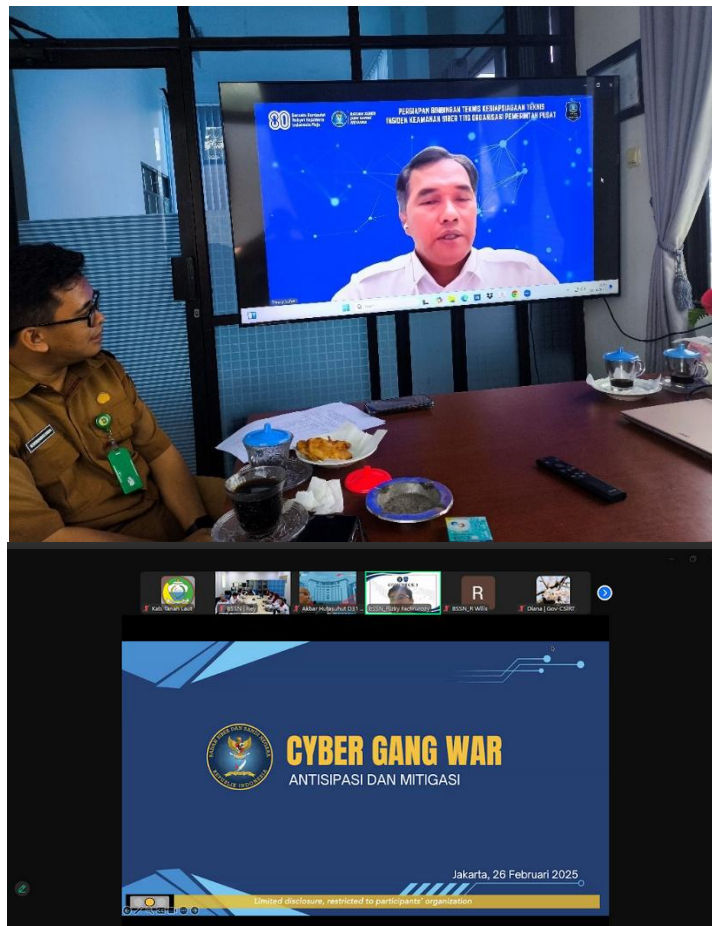
(*Communication Check*) Govt-CSIRT Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Sandi dan Siber Negara.



Gambar 3.33 Sertifikat Uji Komunikasi (*Communication Check*) Govt-CSIRT Tahun 2025

6. Peningkatan kapasitas SDM keamanan Informasi

Peningkatan kapasitas SDM keamanan informasi di Pemkab Tanah Laut difokuskan pada penguatan literasi siber dan teknis persandian untuk mendukung SPBE, mengingat adanya tantangan kurangnya fungsional Sandiman dan operator teknis. Target 2025 adalah meningkatkan indeks keamanan informasi, penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik), serta membangun SDM yang cakap mengelola data yang terintegrasi. Tantangan utama yang dialami Kabupaten Tanah Laut ialah masih kurangnya personil fungsional Sandiman dan operator sandi di Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo dan Statistik Kabupaten Tanah Laut. Sehingga upaya yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian khususnya pada bidang Statistik dan Persandian. Dalam upaya peningkatan SDM keamanan informasi tersebut dilakukan kegiatan bimtek, sosialisasi maupun seminar terkait keamanan informasi baik secara daring maupun luring.



Gambar 3.34 Kegiatan Bimtek Keamanan Informasi secara daring

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Telah tersusunnya dokumen arsitektur arsitektur SPBE, dokumen manajemen SPBE, dan Peta Rencana Pemerintah Digital.
2. Telah dilakukan upaya penguatan integrasi untuk beberapa sistem dan layanan digital untuk terhubung ke dalam kerangka arsitektur SPBE.
3. Telah dilakukan evaluasi berkelanjutan yakni melakukan audit internal.
4. Telah melibatkan unit/SKPD teknis lainnya dalam upaya peningkatan pemenuhan indikator-indikator SPBE di tahun berjalan.
5. Pembangunan infrastruktur TIK yang memadai, dimana telah tersedia jaringan internet, pusat data, dan perangkat keras yang telah sesuai standar.
6. Kebijakan dan regulasi yang mendukung dan mendorong transformasi digital.
7. Sumber daya manusia yang kompeten atau SDM yang mampu mengoperasikan dan mengembangkan sistem TIK.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Pada bagian kelengkapan dokumen Arsitektur masih terdapat bagian yang belum sepenuhnya terdokumentasi atau diperbarui sesuai standar.
2. Integrasi layanan yang masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya terhubung dengan arsitektur SPBE.
3. mekanisme monitoring dan evaluasi berkala secara berkala yang belum konsisten sehingga memengaruhi skor akhir penilaian arsitektur SPBE.
4. Belum terjalinnya kolaborasi yang baik antar lintas unit/SKPD untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja sesuai dengan arsitektur yang dibangun.
5. Lambatnya penyesuaian regulasi hukum dengan kecepatan perkembangan teknologi (seperti AI), yang seringkali menghambat inovasi.
6. Infrastruktur internet dan sinyal telekomunikasi belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah-daerah yang masih blankspot.
7. Banyak pengguna yang belum memiliki kemampuan (skill) untuk menggunakan teknologi secara produktif, aman, dan bijak.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Fokus pada detail teknis untuk menyempurnakan dokumentasi arsitektur dan memastikan semua komponen sesuai standar.
2. Penguatan Integrasi untuk memastikan seluruh sistem dan layanan digital terhubung dalam kerangka arsitektur SPBE.
3. Melakukan Evaluasi Berkelanjutan yakni melakukan audit internal secara berkala untuk menjaga konsistensi nilai capaian.
4. Kolaborasi lintas unit/SKPD untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja agar tidak ada celah dalam penerapan arsitektur ke depannya.
5. Fokus pada inovasi untuk mendorong adopsi teknologi baru (AI, IoT, cloud, big data) untuk peningkatan layanan publik.
6. Melakukan perluasan akses untuk memastikan pemerataan TIK hingga ke daerah terpencil atau daerah-daerah blankspot melalui pembangunan menara penguat sinyal (*GSM Booster*).
7. Melakukan penguatan SDM melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknologi masyarakat.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 38 ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 20.021.478.299,64 dan terealisasi Rp. 18.795.961.958,91 atau sebesar 93,88%

Tabel 3.12
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.839.197.877,76	5.124.526.854,00
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.323.003.541,46	6.096.737.164,91
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.553.054.941,75	7.294.391.585,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	149.520.853,19	130.491.355,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	156.701.085,48	149.815.000,00
	JUMLAH	20.021.478.299,64	18.795.961.958,91

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital

$$\text{Efisiensi} = \frac{(20.021.478.299,64 \times 99,36\%) - 18.795.961.958,91}{(20.021.478.299,64 \times 99,36\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 5,52\%$$

Tabel 3.13
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,36%	93,88%	5,52%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD pada Dinas Komunikasi, Informasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 20.021.478.299,64 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar minus Rp. 20.021.478.299,64.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 18.795.961.958,91 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 18.795.961.958,915

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 (SILPA) adalah jumlah defisit sebesar Rp. 1.225.516.340,73, maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2025 posisi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.225.516.340,73.

TUJUAN I

Tabel 3.14

Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program					
					Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase		
						Rp	Rp	%		
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	1	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,12	3,10	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.323.003.541,46	6.096.737.164,91	96,42 %
		2	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi	5,0	-	2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.553.054.941,75	7.294.391.585,00	96,58 %
						3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	149.520.853,19	130.491.355,00	87,27 %
						4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	156.701.085,48	149.815.000,00	95,61 %

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	20.021.478.299,64	18.795.961.958,91	93,87	13.690.453.242,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.965.120.076,90	13.934.486.632,91	93,11	10.903.540.717,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.309.476.880,00	3.967.209.304,00	92,05	3.294.111.538,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.929.174.799,00	1.758.332.696,00	91,14	1.482.455.560,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.380.302.081,00	2.208.876.608,00	92,79	1.811.655.978,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.921.915.196,90	9.270.976.544,00	93,43	7.609.429.179,00
5.1.02.01	Belanja Barang	219.194.462,01	190.524.039,00	86,92	264.948.770,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.577.161.734,89	8.102.527.632,00	94,46	6.456.520.412,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	617.540.000,00	551.391.492,00	89,28	274.103.103,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	500.019.000,00	418.533.381,00	83,70	613.856.894,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	733.728.000,00	696.300.784,91	94,89	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	733.728.000,00	696.300.784,91	94,89	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.965.120.076,90	13.934.486.632,91	93,11	10.903.540.717,00
5.2	BELANJA MODAL	5.056.358.222,74	4.861.475.326,00	96,14	2.786.912.525,00

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.856.558.222,74	4.672.470.076,00	96,20	2.534.008.125,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	339.901.995,50	289.237.497,00	85,09	239.948.125,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.849.379.537,01	1.802.698.080,00	97,47	1.630.670.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.667.276.690,23	2.580.534.499,00	96,74	661.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	167.404.400,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	167.404.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	199.800.000,00	189.005.250,00	94,59	85.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	199.800.000,00	189.005.250,00	94,59	85.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.056.358.222,74	4.861.475.326,00	96,14	2.786.912.525,00
	JUMLAH BELANJA	20.021.478.299,64	18.795.961.958,91	93,87	13.690.453.242,00
	SURPLUS/DEFISIT	(20.021.478.299,64)	(18.795.961.958,91)	93,88	(13.690.453.242,00)

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%	Peningkatan /Penurunan (%)
		Pagu Tahun 2024	Pagu APBD-P Tahun 2024	Tahun 2024		Pagu Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Tahun 2025		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	4		4	5					

1.	BELANJA DAERAH	14.593.477.772	15.050.625.689	13.690.453.242	90,96	14.593.477.772	20.021.478.299,64	18.795.961.958,91	93,88	2,92
1.1	BELANJA OPERASI	11.820.185.292	12.128.280.092	10.903.540.717	89,90	12.795.432.879,45	14.965.120.076,90	13.934.486.632,91	93,11	3,91
	- Belanja Pegawai	4.058.545.453	4.058.545.453	3.294.111.538	81,16	4.058.545.453,00	4.309.476.880,00	3.967.209.304,00	92,06	10,9
	- Belanja Barang dan Jasa	7.761.639.839	8.069.734.639	7.609.429.179	94,30	8.003.159.426,45	9.921.915.196,90	9.270.976.544,00	93,44	-0,86
	- Belanja Hibah	0	0	0	0	733.728.000	733.728.000	696.300.784,91	94,90	94,90
1.2	BELANJ MODAL	2.773.292.480	2.922.345.597	2.786.912.525	95,37	2.202.449.532,33	5.056.358.222,74	4.861.475.326,00	96,15	0,78
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.551.836.572	2.651.253.325	2.534.008.125	95,58	339.000.167,33	4.856.558.222,74	4.672.470.076,00	96,21	0,63
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.555.908	171.192.272	167.404.400	97,79	1.663.649.365,00	0	0	0	-97,79
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Belanja Modal Aset Lainnya	99.900.000	99.900.000	85.500.000	85,59	199.800.000,00	199.800.000,00	189.005.250,00	94,60	9,01
	Jumlah	14.298.548.208	15.282.604.284	13.845.191.241	90,59	14.997.882.411,78	20.021.478.299,64	18.795.961.958,91	93,88	3,29

Sumber : SIPD Akuntansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2025

Gambaran tabel 3.13 tersebut di atas menunjukkan bahwa pada pos belanja tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.795.961.958,91 (93,88%), ada kenaikan sebesar 3,29 % dari persentase belanja tahun 2024 90,59%, hal ini menunjukkan ada kenaikan nilai realisasi keuangan dengan pencapaian kinerja fisik telah terlaksana seluruhnya di tahun 2025 dengan predikat sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 99,36% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Internal melalui penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE/Pemdi yakni menetapkan dokumen peta rencana yang memuat arah, tahapan, dan program/kegiatan terintegrasi selama lima tahun (2025-2029) untuk menghindari pemborosan anggaran.
2. Melaksanakan Integrasi Data dan Aplikasi diantaranya mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pusat data terpadu dan jaringan intra pemerintah untuk mendukung keterpaduan layanan, mengintegrasikan aplikasi layanan, dan pemanfaatan Data Sektoral untuk meningkatkan keterpaduan data melalui penguatan peran Statistik Sektoral (Satu Data Tanah Laut).
3. Melaksanakan Peningkatan Literasi Digital yakni pelatihan dan bimtek (Bimbingan Teknis) digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang teknologi.
4. Melaksanakan Penguatan Keamanan Siber dan audit keamanan informasi / audit TIK.

5. Meningkatkan Kolaborasi antar SKPD dalam mendorong kinerja tim koordinasi SPBE/Pemdi untuk mempercepat penerapan SPBE/Pemerintahan Digital Nasional.

Pelaihari, Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP. 198403202002122002



LAMPIRAN

Pencapaian kinerja utama pada jabatan struktural dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yaitu digambarkan pada tabel berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Utama Jabatan Struktural

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Kepala Dinas				
	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	1. Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,12	3,10	99,36
		2. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	5	-	-
2	Sekretaris				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,3 nilai	82,9 nilai	100,73%
		2. Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %	100%	100%
3	Kepala Bidang Komunikasi Publik				
	Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	75%	78%	104%
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>				
	Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase layanan Aplikasi dan Informatika	100%	100%	100%
5	Kepala Bidang Statistik dan Persandian				

	Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,3 poin	2,25 poin	97,83%
	Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	470 angka	388 angka	82,55%
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan				
	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
7	Kepala Sub Bagian Keuangan				
	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIKA AMALIA, S.STP, M.SI

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK PERTAMA

RIKA AMALIA, S.STP, M.SI
NIP. 198403202002122002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis digital	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	5 Indeks
		Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,12 Nilai
2	-	-	-

	Program	Anggaran
	Program	
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	6.323.003.542
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.553.054.942
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	149.520.853
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	156.701.086
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.832.708.412

TANAH LAUT, 02 September 2025

BUPATI TANAH LAUT

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

H. RAHMAT TRIANTO

RIKA AMALIA, S.STP, M.SI
NIP. 198403202002122002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARGARETA HABIBAH, S.ST, M.I.Kom

Jabatan : Kabid Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002

MARGARETA HABIBAH, S.ST, M.I.Kom
NIP 197804092005012017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	75
2	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100 Persen
3	Terlaksananya pembinaan SDM KIM (Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat)	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas
4	Terlaksananya pemeliharaan aplikasi pengelolaan informasi (Pelayanan Informasi Publik)	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Permohonan
5	Meningkatnya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik)	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi
6	Terlaksananya monitoring dan evaluasi media Komunikasi publik (Pengelolaan Media Komunikasi Publik)	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	15 Media
7	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (Penyusunan Konten)	Jumlah Konten Informasi Publik	750 Konten

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.323.003.542
	Sub Kegiatan	
2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	41.740.541
3	Pelayanan Informasi Publik	887.060.773
4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	15.427.845
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.861.541.000
6	Penyusunan Konten	2.517.233.383
	Program	
7	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	6.323.003.542

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Komunikasi Publik

Kepala Dinas



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002



MARGARETA HABIBAH, S.ST, M.I.Kom
NIP 197804092005012017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADERIANSYAH, S.Sos, M.I.Kom

Jabatan : Kabid Penyelenggaraan E-Government

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002

HADERIANSYAH, S.Sos, M.I.Kom
NIP 198005042009031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika (PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA)	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	100 %
2	Meningkatnya jangkauan telekomunikasi (Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen
3	Terkelolanya domain Kabupaten (Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah)	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi
4	Tersusunnya master plan pengembangan komunikasi di daerah blank spot (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota)	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31 Perangkat Daerah

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.553.054.942
	Sub Kegiatan	
2	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	228.461.295
3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	7.324.593.647

	Program	
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.553.054.942

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Kabid Penyelenggaraan E-Government



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002



HADERIANSYAH, S.Sos, M.I.Kom
NIP 198005042009031004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRI SETIAWAN, S.Kom, M.I.Kom

Jabatan : Kabid Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002

ANDRI SETIAWAN, S.Kom, M.I.Kom
NIP 198508152009031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut (PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,3
2	Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi (PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI)	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	470
3	Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah (Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut	100 Persen
4	Meningkatnya penerapan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah (Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen
5	Terlaksananya pemeriksaan data statistik sektoral oleh walidata (Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral)	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80 Persentase
6	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM statistik (Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia)	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dokumen
7	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM keamanan Informasi (Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)		
8	Terlaksananya evaluasi TTE (Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 Perangkat Daerah

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.520.853
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	156.701.086
	Sub Kegiatan	
3	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	93.882.038
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	55.638.815
5	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.006.520
6	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85.694.566
	Program	
7	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	149.520.853
8	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	156.701.086

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Kabid Statistik dan Persandian

RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002

ANDRI SETIAWAN, S.Kom, M.I.Kom
NIP 198508152009031005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah
Laut 70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD FAUZI, S.Kom

Jabatan : Plt. Kasubbag Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
NIP 197003031996031002

PIHAK PERTAMA

AHMAD FAUZI, S.Kom
NIP 19900928 2015021004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen
2	- (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
3	- (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.926.535
	Sub Kegiatan	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.055.880
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	870.655

Pelaihari, 2 September 2025

Plt. Kasubbag Perencanaan

Sekretaris



MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
 NIP 197003031996031002



AHMAD FAUZI, S.Kom
 NIP 19900928 2015021004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah
Laut 70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD FAUZI, S.Kom

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
NIP 197003031996031002

TANAH LAUT,
PIHAK PERTAMA

AHMAD FAUZI, S.Kom
NIP 199009282015021004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.313.017.008
	Sub Kegiatan	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.309.476.880
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.540.128

Pelaihari, 2 September 2025

Sekretaris



MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
 NIP 197003031996031002

Kasubbag Keuangan



AHMAD FAUZI, S.Kom
 NIP 19900928 2015021004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah
Laut 70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIA AZIZAH, SKM, M.M

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
NIP 197003031996031002

YULIA AZIZAH, SKM, M.M
NIP 198411062009032009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
6	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pendidikan dan Pelatihan)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang

	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)		
8	- (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
9	- (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
10	- (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
11	- (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
12	- (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen
13	- (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
14	- (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
15	- (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen
16	- (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
17	- (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
18	- (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
19	- (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
20	- (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
21	- (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
22	- (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit

23	- (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
----	--	--	--------

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.040.559
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.919.250
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.965.060
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.840.000
	Sub Kegiatan	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.446.101
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.028.831
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.170.896
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.414.948
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
13	Penyediaan Bahan/Material	22.323.473
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.205.000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.451.310
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.597.033
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.322.217
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	308.850.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.115.060
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.590.000
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.750.000

Pelaihari, 2 September 2025
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sekretaris



MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
NIP 197003031996031002



YULIA AZIZAH, SKM, M.M
NIP 198411062009032009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah
Laut 70814 Website : <https://diskominfo.tanahlautkab.go.id/>
e-mail : diskominfo.tala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
NIP 197003031996031002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,3 Persen

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.832.708.412

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas

Sekretaris



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP 198403202002122002



MUHAMAD DINUL BAKTIAN, ST., MT
NIP 197003031996031002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran, Pelaihari. Kode Pos 70814

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 000.8.6.3/14-DKISP/VIII/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan priode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198403202002122002

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 000.8.6.3/14-DKISP/VIII/2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT

- Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pembinaan UPT Dinas;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	Hasil Penilaian Pemerintah Digital dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Dinas Kominfo
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Hasil Penilaian IP-TIK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Dinas Kominfo

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198403202002122002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 000.8.6.3/14-DKISP/VIII/2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT**

1. Definisi operasional *Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital* merujuk pada sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan prinsip, komponen, dan struktur dari Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital dalam tata kelola dan pelaksanaan layanan digitalnya.

Secara umum, tingkat implementasi ini mencakup:

- **Kesesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital** dengan Arsitektur Pemerintah Digital Nasional dan Rencana Induk Pemerintah Digital
 - **Integrasi antar domain arsitektur**, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan
 - **Keterpaduan layanan digital** yang dihasilkan dari penerapan arsitektur tersebut
 - **Ketersediaan dan kualitas dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital**, yang menunjukkan strategi implementasi dalam jangka waktu tertentu
 - **Efektivitas koordinasi antar unit kerja** dalam pelaksanaan Pemerintah Digital
 - **Pemantauan dan evaluasi berkala** terhadap pelaksanaan arsitektur Pemerintah Digital
2. Definisi operasional **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)** adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kesiapan suatu wilayah dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan.

RENCANA AKSI
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Persentase - Nilai	86 82,3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		- Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Persen - Nilai	100 82,3	5,616,438,830	4,997,643,490	88.98%	0% 0	921,870	0.02%	0% 0	617,873,470	11%	0% 82,3	-	0%	100% 0	DAU PAD SILPA
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	3,656,543	3,041,963	83%	25%	-	0%	50%	614,580	17%	75%	-	0%	100%	SILPA
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		7	2,529,813	1,915,233	76%	1	-	0%	3	614,580	24%	1	-	0%	2	SILPA
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1,126,730	1,126,730	100%	2	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	SILPA
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4,062,972,126	4,062,050,256	99.98%	25%	921,870	0.02%	50%	-	0%	75%	-	0%	100%	DAU PAD SILPA
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	4,058,545,453	4,058,545,453	25%	22	-	25%	22	-	25%	22	-	25%	22	DAU PAD SILPA
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	4,426,673	3,504,803	79%	1	921,870	21%	2	-	0%	1	-	0%	1	SILPA
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	46,705,500	30,000,000	64%	25%	-	0%	50%	16,705,500	36%	75%	-	0%	100%	SILPA
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	43	16,705,500	-	0%	0	-	0%	0	16,705,500	100%	43	-	0%	0	SILPA
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	30,000,000	30,000,000	100%	5	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	SILPA
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	354,047,278	317,954,491	90%	25%	-	0%	50%	36,092,787	10%	75%	-	0%	100%	SILPA
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8,446,101	8,446,101	100%	1	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	SILPA

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	59,999,223	45,808,589	76%	2	-	0%	0	14,190,634	24%	2	-	0%	0	SILPA
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12,170,896	9,268,743	76%	1	-	0%	0	2,902,153	24%	0	-	0%	0	SILPA
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14,999,748	13,999,748	93%	1	-	0%	0	1,000,000	7%	1	-	0%		SILPA
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	6,000,000	3,000,000	50%	2	-	0%	2	3,000,000	50%	2	-	0%	2	SILPA
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15,000,000	-	0%	0	-	0%	0	15,000,000	100%	2	-	0%	0	SILPA
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	234,980,000	234,980,000	25%	3	-	25%	3	-	25%	3	-	25%	3	SILPA
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	2,451,310	2,451,310	100%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	SILPA
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	47,949,250	47,949,250	100%	25%	-	0%	50%	-	0%	75%	-	0%	100%	SILPA
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5,597,033	5,597,033	100%	1	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	SILPA
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	42,352,217	42,352,217	100%	1	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	SILPA
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	100	815,115,060	407,557,530	50%	25%	-	0%	50%	407,557,530	50%	75%	-	0%	100%	SILPA
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	270,000,000	135,000,000	50%	3	-	0%	3	135,000,000	50%	3	-	0%	3	SILPA
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	545,115,060	272,557,530	50%	3	-	0%	3	272,557,530	50%	3	-	0%	3	SILPA

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	285,993,073	129,090,000	45%	25%	-	0%	50%	156,903,073	55%	75%	-	0%	100%	SILPA
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37,500,000	37,500,000	25%	1	-	25%	1	-	25%	1	-	25%	1	SILPA
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	76,590,000	76,590,000	25%	8	-	25%	8	-	25%	8	-	25%	8	SILPA
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	15,000,000	15,000,000	100%	22	-	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	SILPA
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	156,903,073	-	0%	0	-	0%	0	156,903,073	100%	1	-	0%	0	SILPA
2	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE - Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Nilai	3,15 5,1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	Persen	75	3,237,639,281	1,636,622,255	51%	25%	531,847,635	16%	50%	549,299,391	17%	65%	519,870,000	16%	75%	SILPA
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	3,237,639,281	1,636,622,255	51%	25%	531,847,635	16%	50%	549,299,391	17%	75%	519,870,000	16%	100%	SILPA
						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	3	29,015,541	19,900,000	69%	2	-	0%	0	9,115,541	31%	1	-	0%	0	SILPA
						Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	4	779,387,675	774,287,675	99%	2	-	0%	0	5,100,000	1%	2	-	0%	0	SILPA
						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	3	21,801,485	9,695,000	44%	1	6,647,635	30%	1	5,458,850	25%	1	-	0%	0	SILPA

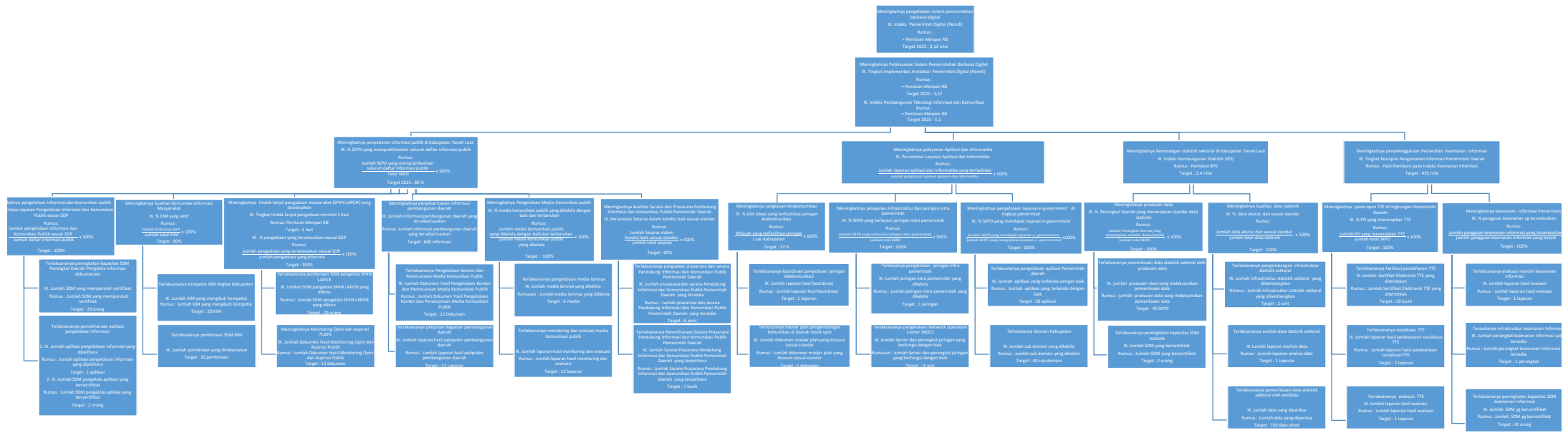
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	15	2,176,150,000	620,125,000	28%	15	519,200,000	24%	15	517,625,000	24%	15	519,200,000	24%	15	SILPA
					Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	750	231,284,580	212,614,580	92%	185	6,000,000	3%	185	12,000,000	5%	190	670,000	0%	190	SILPA
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	Persen	100	5,883,235,271	4,108,345,271	70%	0%	298,590,000	5%	0%	1,476,300,000	25%	0%	-	0%	100%	SILPA
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	5,883,235,271	4,108,345,271	70%	25%	298,590,000	5%	50%	1,476,300,000	25%	75%	-	0%	100%	SILPA
					Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	3	361,159,295	222,409,295	62%	2	138,750,000	38%	1	-	0%	0	-	0%	0	SILPA
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	31	5,522,075,976	3,885,935,976	70%	31	159,840,000	3%	31	1,476,300,000	27%	31	-	0%	31	SILPA
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai	2.3	152,112,038	89,362,038	59%	-	62,750,000	41%	-	-	0%	-	-	0%	2,3	SILPA
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	152,112,038	89,362,038	59%	25%	62,750,000	41%	50%	-	0%	75%	-	0%	100%	SILPA
					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	80	99,162,038	36,412,038	37%	40	62,750,000	63%	50	-	0%	60	-	0%	80	SILPA
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	5	52,950,000	52,950,000	100%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	SILPA
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi	Nilai	470	108,456,993	-	0%	-	98,156,993	91%	-	10,300,000	9%	-	-	0%	470	SILPA

					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	108,456,993	-	0%	25%	98,156,993	91%	50%	10,300,000	9%	75%	-	0%	100%	SILPA
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	71,438,127	-	0%	0	71,438,127	100%	1	-	0%	0	-	0%	0	SILPA
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	32	37,018,866	-	0%	25	26,718,866	72%	28	10,300,000	28%	30	-	0%	32	SILPA
TOTAL									14,997,882,413													



Tanah Laut, 02 Januari 2025
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 Kabupaten Tanah Laut

AMALIA, S.STP, M.Si
 NIP. 198903201002122002



**CASCADING RENSTRA DISKOMINFOSTASAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>		
- Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis digital				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		IKU Pemda		
					Indeks Pemerintah Digital		IKU Pemda		
		Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital				Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
						Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
						Meningkatnya produsen data	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
						Meningkatnya kualitas data statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian

					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya produsen data	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik
				Meningkatnya kualitas data statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik

		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik
		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik
	Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Meningkatnya pengelolaan layanan e-government di lingkup pemerintah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
		Meningkatnya jangkauan telekomunikasi	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Meningkatnya pengelolaan layanan e-government di lingkup pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
	Meningkatnya jangkauan telekomunikasi	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut		Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kepala Bidang Komunikasi Publik
	Meningkatnya kualitas Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
	Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) yang diselesaikan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik

Meningkatnya Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
Meningkatnya kualitas Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kepala Bidang Komunikasi Publik
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik
Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) yang diselesaikan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik

	Meningkatnya Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik	
	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	Kepala Bidang Komunikasi Publik	
		Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	Kepala Bidang Komunikasi Publik	
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik	
	Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
		Meningkatnya penerapan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	

				Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
				Meningkatnya penerapan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	
				Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
--	--	--	--	--	--	---	--



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspektortanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/226/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
di
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/330/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,70 dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”.

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	26,10	25,50
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,30
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		82,10	82,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

1. Masih terdapat inkonsistensi dalam penentuan indikator kinerja pada pohon kinerja dengan dokumen perencanaan yaitu :

Dalam Pohon Kinerja :

- Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE
- Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Indikator ini tidak sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 yaitu :

- Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital
 - Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
2. Pohon kinerja belum menggambarkan adanya crosscutting yg menggambarkan keterkaitan dengan bidang/skpd lainnya

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Realisasi rencana aksi kinerja yang disampaikan di aplikasi belum didukung data dukung yang benar dan sudah terverifikasi.

Melihat isi data dukung data realisasi rencana aksi kinerja yang disampaikan di aplikasi, seharusnya dalam melaporkan realisasi/capaian di aplikasi dilampiri data dukung yang benar dan sudah terverifikasi seperti Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo atau Jumlah Konten Informasi Publik.

- 2) Pemantauan analisis capaian kinerja capaian kinerja unit dibawahnya secara berkala.

Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-Kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, namun umpan balik (*feedback*) dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan belum ada uraian perhitungan realisasi sasaran/indikator PK.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 (kategori Baik) sehingga diperoleh persentase pencapaian domain SPBE sebesar 62,4% dari target capaian 64%. Tidak terdapat uraian yang menjelaskan bahwa nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 capaiannya adalah 62,4%.

- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum cukup mengungkap informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja daerah lain/di level nasional secara memadai.

Dalam LKj Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut hanya disebutkan "Perolehan nilai tersebut jika dibandingkan dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada di urutan kesembilan dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3,63	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,81	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	4,09	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	3,37	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,70	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,43	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,51	Cukup
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,30	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	3,34	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,06	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,74	Baik

Hasil perolehan persentase capaian domain SPBE tahun 2024 sebesar 62,4% jika dibandingkan dengan capaian domain SPBE nasional tahun 2024 yakni sebesar 62,4%, maka capaian persentase capaian domain SPBE Kabupaten Tanah Laut telah sama dengan persentase capaian domain SPBE nasional”.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Masih terdapat hasil rekomendasi hasil evaluasi internal tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yaitu Rencana Tindak Lanjut berupa feedback pimpinan akan disajikan umpan balik yang berkelanjutan terhadap kinerja.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Agar Indikator kinerja pada pohon kinerja disesuaikan dengan indikator kinerja pada Dokumen Perencanaan
- 2) Agar dalam Pohon kinerja digambarkan adanya crosscutting yg menggambarkan keterkaitan dengan bidang/skpd lainnya

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Agar dalam perhitungan realisasi rencana aksi kinerja yang disampaikan di aplikasi didukung data dukung yang benar dan sudah terverifikasi, seperti Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo atau Jumlah Konten Informasi Publik
- 2) Agar dilakukan pemantauan analisis capaian kinerja capaian kinerja unit dibawahnya secara berkala.
Dalam implementasi dalam penilaian SKP bulanan umpan balik (*feedback*) dari pimpinan tidak hanya berupa simbol "jempol" tapi dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Agar Dokumen Laporan Kinerja mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dengan Uraian perhitungan realisasi sasaran/indikator PK. Agar dijelaskan bahwa nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 capaiannya adalah 62,4%
- 2) Agar dokumen Laporan Kinerja mengungkap informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja daerah lain/di level nasional secara memadai.
Dalam Lkj Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut agar digambarkan perbandingan pencapaian indeks SPBE dengan daerah lain di Indonesia secara lebih komprehensif.

d. Evaluasi Internal

Agar hasil rekomendasi hasil evaluasi internal tahun sebelumnya segera ditindaklanjuti yaitu Rencana Tindak Lanjut berupa feedback pimpinan akan disajikan umpan balik yang berkelanjutan terhadap kinerja.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan kinerja telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024;
2. Dokumen Renja dan PK telah dipublikasikan pada bulan Januari 2024;
3. Pelaksanaan perubahan anggaran akan dilaksanakan pada bulan September 2024 s.d. Oktober 2024;
4. Pelaksanaan monev per triwulan telah dilaksanakan melalui aplikasi emonev di tahun berjalan;
5. Feedback SKP akan diisi pada penilaian kinerja tahun selanjutnya;
6. Telah dilaksanakan koordinasi berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pencapaian-pencapaian indikator sebanyak 2 kali;
7. Laporan kinerja berkala (monev per triwulan telah dilaksanakan melalui aplikasi emonev;
8. Tindak Lanjut rekomendasi dan rencana aksi telah disusun dan akan dilaksanakan di tahun 2024.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Diskominfostasan	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,50
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,10
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,00
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,6
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,50

4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				82,90
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan



Pi Inspektur,

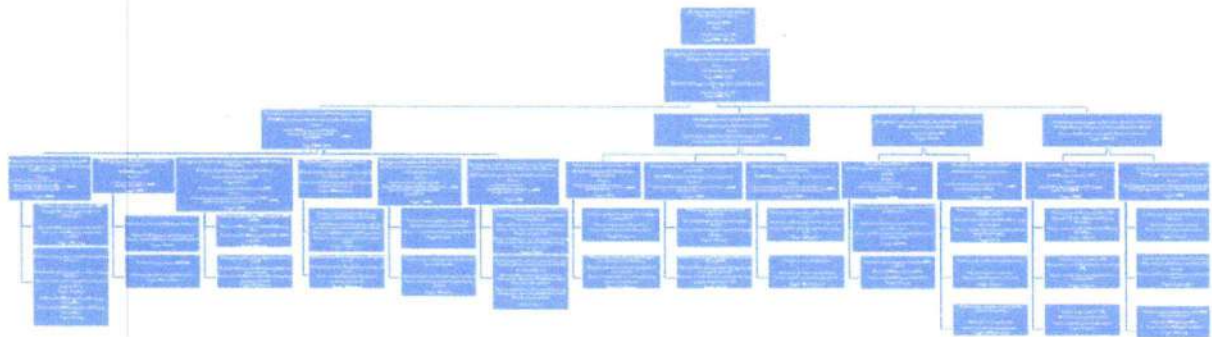
Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

a. Perencanaan Kinerja

Pohon Kinerja Diskominfoastan



Rancangan Renstra 2025-2029

Tabel 3.3. Teknis Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis digital	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks SPBE	3,12	3,12	3,25	3,3	3,35	3,4	3,5	
			Indeks Pemerintah Digital	-	-	1,70	1,70	2,00	2,00	2,30	
			Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,10	3,12	2,15	2,15	2,3	2,3	2,6	
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	

Penetapan IKU

1. Menetapkan target dan yang menjadi upaya untuk tercapainya tujuan dan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	Hasil Penilaian SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Dinas Kominfoastan
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Hasil Penilaian SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Dinas Kominfoastan

a.n. BUPATI TANAH LAUT
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
 Statistik dan Persandian

IRMA AMALIA, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP 198403202002122002

b. Pengukuran Kinerja
1) *Feedback* Kinerja

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PM/PINAN YANG DUNTERVERSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Indikator : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Kuantitas	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian terbit dan tepat waktu	100 %	100% berdasarkan tata kelola administrasi umum dan kepegawaian terbit dan tepat waktu	Pimpinan ●
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Indikator : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya implementasi RH dan akuntabilitas kinerja	Kualitas	Persentase pemenuhan dokumen tematik Reformasi Birokrasi	100 %	100 % berdasarkan dokumen tematik reformasi birokrasi	Pimpinan ●
			Kuantitas	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP SKPD	100 %	100 % berdasarkan dokumen SAKIP SKPD	Pimpinan ●
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA							UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solatif, dan dapat diandalkan - Melainkan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedoman dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan berorientasi pelayanan				Pimpinan: ●
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan RMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan lelucon jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedoman dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi				Pimpinan: ●
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedoman dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Pimpinan: ●
4	Harmonis						

C. Pelaporan Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 (kategori Baik) sehingga diperoleh

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,12 (kategori Baik) sehingga diperoleh

D. Evaluasi Kinerja

MATRIK TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
i. Perencanaan Kinerja						
1.	Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	Penyusunan perencanaan kinerja akan mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	2 kali	Januari dan Oktober 2024	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	- Penyusunan kinerja telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024
2.	Agar dokumen perencanaan yaitu dokumen Renja dan PK dapat dipublikasikan tepat waktu	Dokumen perencanaan yaitu dokumen Renja dan PK akan dipublikasikan dengan tepat waktu	1 kegiatan	Januari 2024	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	- Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan pada bulan Januari 2024
ii. Pengukuran Kinerja						
1.	Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	Pelaksanaan perubahan Renja akan memperhatikan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	1 kali	September s.d Oktober 2024	Seluruh PPTK	- Pelaksanaan perubahan anggaran akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2024 - Pelaksanaan monev per triwulan telah dilaksanakan melalui aplikasi emonev di tahun berjalan
2.	Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK)	Pada SKP feedback pimpinan akan disajikan umpan balik yang	1 kali	1 tahun	Seluruh ASN Dinas Kominfo	Feedback SKP akan diisi pada penilaian kinerja tahun selanjutnya



Pt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGAE
Rembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009